



Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan

05 JANUARY 2024

LAPORAN KINERJA

Nomor:
OT.04/LKJ-005/PW21/1/2024

KATA PENGANTAR

Prinsip manajemen berbasis kinerja mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerjanya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mencakup penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan di Provinsi Sulawesi Selatan baik berupa *assurance* maupun *consulting* dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas-tugas dukungan pengawasan.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020-2024. Dalam perjanjian kinerja tahun 2023 terdapat tujuh sasaran kegiatan yang dijabarkan ke dalam 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran menunjukkan 30 (tiga puluh) indikator mencapai/melampaui target dan 6 indikator belum mencapai target.

Realisasi kinerja tahun 2023 berdasarkan sasaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsi utama sebagai Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi upaya perbaikan kinerja dan peningkatan serta penguatan peran BPKP di Provinsi Sulawesi Selatan.



Makassar, 5 Januari 2024
Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Mohamad Risbiyantoro



RINGKASAN EKSEKUTIF



Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah

Rp3.109.640.169,90

Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

Rp690.663.808.749,00

Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

Rp146.509.953.440,85

15 INSPEKTORAT DENGAN KAPABILITAS APIP LEVEL 3

**DARI TOTAL 36 INDIKATOR:
30 TERCAPAI/MELAMPAUI
6 TIDAK TERCAPAI**

18



18 DAERAH DENGAN MATURITAS SPIP LEVEL 3

SULAWESI SELATAN



18 MATURITAS SPIP LEVEL 3

Provinsi Sulawesi Selatan

Kota Palopo

Kab. Bantaeng

Kab. Bulukumba

Kab. Gowa

Kab. Luwu

Kab. Maros

Kab. Sinjai

Kab. Soppeng

Kota Makassar

Kota Parepare

Kab. Bone

Kab. Luwu Timur

Kab. Luwu Utara

Kab. Pinrang

Kab. Sidrap

Kab. Pangkep

Kab. Wajo



15 KAPABILITAS APIP LEVEL 3

APIP Kab. Luwu Timur

APIP Kab. Luwu Utara

APIP Kota Makassar

APIP Kota Parepare

APIP Kab. Bone

APIP Kab. Pinrang

APIP Kab. Sidrap

APIP Kab. Pangkep

APIP Kab. Sinjai

APIP Kab. Enrekang

APIP Kab. Wajo

APIP Kab. Gowa

APIP Kab. Maros

APIP Kab. Bantaeng

APIP Kota Palopo

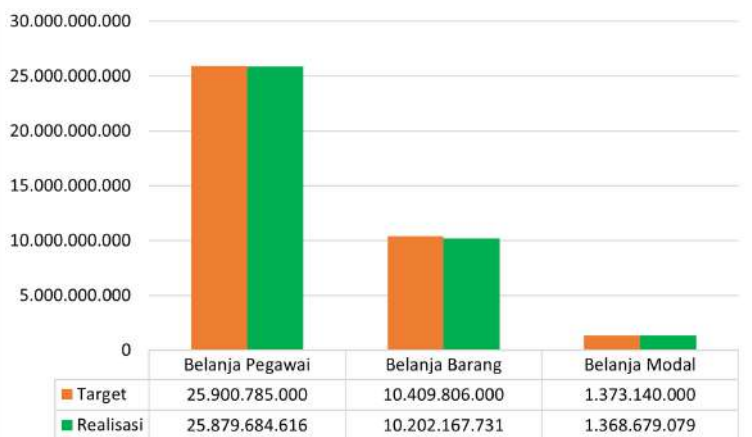


EWAKO BPKP SULSEL



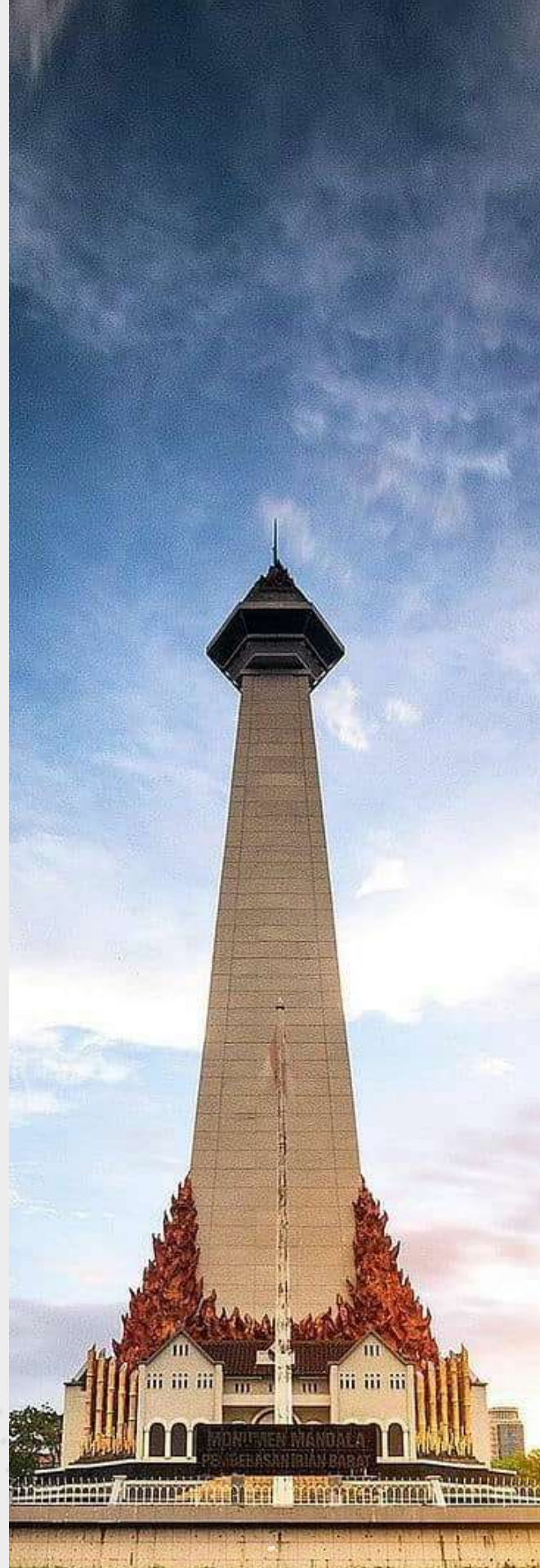
REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebesar Rp37.450.531.426,00 atau 99,38% dibandingkan dengan total anggaran tahun 2023 sebesar Rp37.683.731.000,00.



CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan atas tujuh sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam 36 indikator kinerja, menunjukkan bahwa 30 indikator kinerja (83,33%) telah mencapai target dan 6 indikator kinerja (16,67%) tidak mencapai target.



MONUMEN MANDALA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas dan Fungsi	1
B. Struktur Organisasi	3
C. Aspek Strategis Organisasi	4
D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	8
E. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Target Kinerja 2020-2024	11
1. Pernyataan Visi	11
2. Pernyataan Misi	11
3. Tujuan	11
4. Sasaran Strategis	12
5. Program dan Sasaran Program	16
6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	22
1. Ringkasan Kinerja	23
2. Perincian Capaian Kinerja	25
b. Kinerja Lainnya Tahun 2023	66
1. Kinerja Lain	66
2. Penghargaan/Apresiasi Instansi Lain	71
3. Perbaikan SAKIP Tahun 2023	71
C. Akuntabilitas Keuangan	71
BAB IV PENUTUP	73
A. Capaian dan Analisis Kinerja Organisasi	73
B. Upaya dalam Rangka Peningkatan Kinerja	76
LAMPIRAN	79



BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarah dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern.

Fungsi Pertama:

- a) fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden;
- b) fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

Fungsi Kedua:

- a) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
- b) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;



- c) pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
- d) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi;
- e) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
- f) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perpanjangan tangan dari BPKP memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
- c. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
- e. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan 13 (tiga belas) fungsi yang menekankan pada efektivitas dan efisiensi sebagai dasar pencapaian tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melalui proses internal kegiatan pengawasan yang berbasis risiko, terbangunnya pola kemitraan yang efektif dengan *stakeholders*, serta terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan dan aturan.

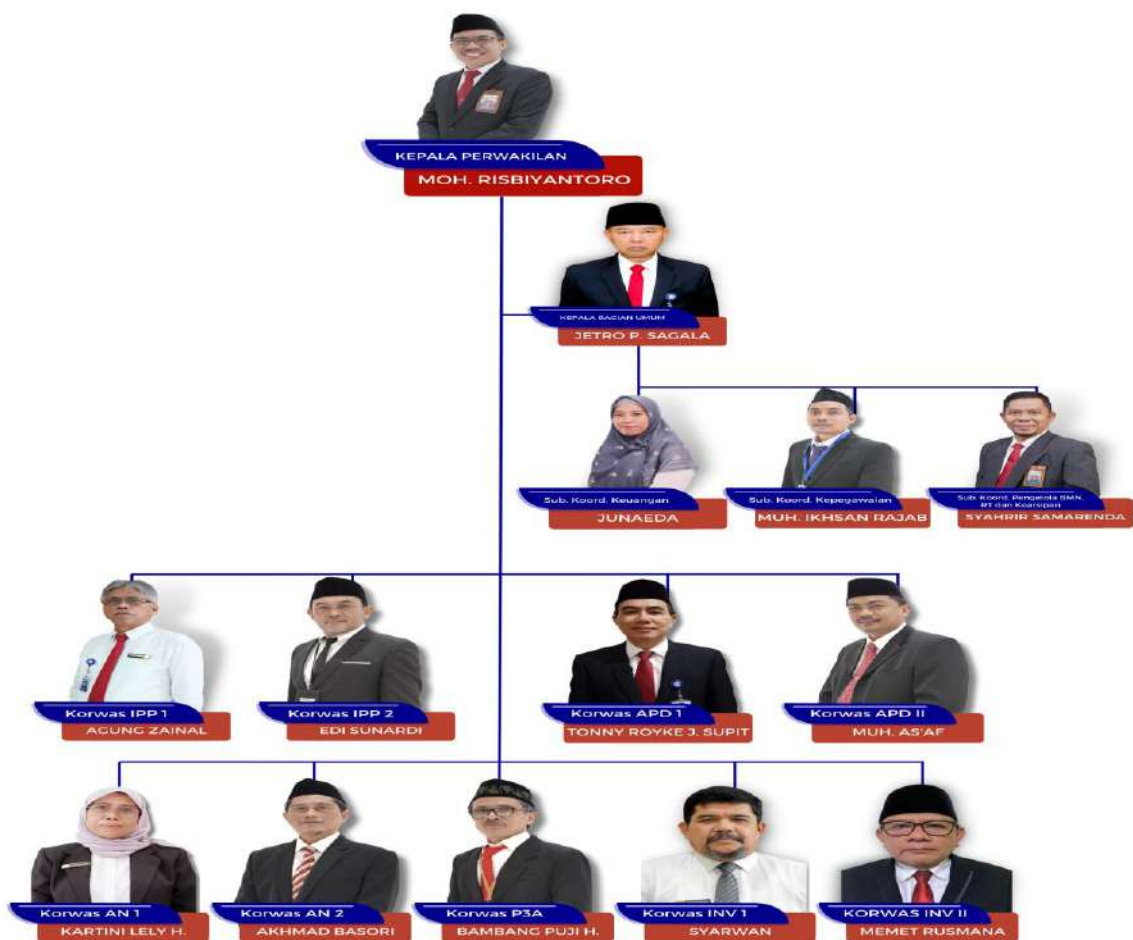
Stakeholders Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari *stakeholders* internal, serta eksternal yaitu pemerintah daerah (Gubernur dan Bupati/Wali Kota), masyarakat (*beneficiaries*), pelaksana kebijakan (Pemda, Instansi Vertikal, BUMN/D, Universitas Negeri), komunitas profesi, BPK-RI Perwakilan, DPRD, dan para mitra kerja (Inspektorat, Polri, Kejaksaan, dan KPK).



Pada perspektif *stakeholders*, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan harus menghasilkan laporan/dokumen yang bermanfaat dan tepat waktu bagi *stakeholders* dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Pasal 6 Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, struktur organisasi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas:



- Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi pemerintah Pusat (IPP) yang dipimpin oleh dua orang Koordinator Pengawasan;
- Kelompok JFA Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) yang dipimpin oleh dua orang Koordinator Pengawasan;
- Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara (AN) yang dipimpin oleh dua orang Koordinator Pengawasan;



- Kelompok JFA Bidang Investigasi yang dipimpin oleh dua orang Koordinator Pengawasan;
- Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (P3A) yang dipimpin oleh satu orang Koordinator Pengawasan.

Tugas masing-masing bagian dan bidang kelompok JFA adalah sebagai berikut:

Bagian Umum yang dibagi menjadi tiga Sub Koordinator yakni Sub Koordinator Kepegawaian (melaksanakan program urusan kepegawaian dan menyusun laporan program Pelatihan Mandiri (PPM) perwakilan), Sub Koordinator Keuangan (melaksanakan program urusan keuangan) dan Sub Koordinator Pengelola BMN, RT dan Kearsipan (melaksanakan program urusan persuratan, urusan dalam perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan perpustakaan).

Kelompok JFA Bidang IPP bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan pusat.

Kelompok JFA Bidang APD bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan daerah.

Kelompok JFA Bidang AN bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang keakuntannegaraan.

Kelompok JFA Bidang Investigasi bertugas melaksanakan kegiatan keinvestigasian.

Kelompok JFA Bidang P3A bertugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan pelaporan perwakilan serta kegiatan pembinaan APIP.

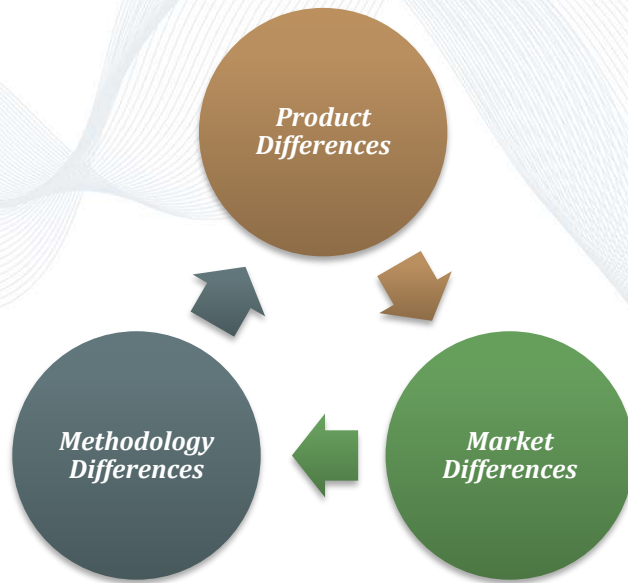
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1. Aspek Strategis Eksternal

BPKP sebagai auditor Presiden memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. Peran pembina SPIP terkait erat dengan peran pengawasan intern, karena dengan penguatan SPIP maka pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan menjadi semakin terjaga dari penyimpangan dan penyalahgunaan dengan strategi penguatan BPKP mencakup:





Product Differences

Kekuatan BPKP tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas produk BPKP harus bersifat strategis, makro, nasional (lintas sektoral) yang merupakan jiwa pasal 49 ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2008. Tugas BPKP bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan intern atas pengelolaan keuangan negara oleh para pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden dalam menjalankan amanah rakyat.

Market Differences

Agar produk BPKP menjadi bernilai, maka harus dikenali melalui market. BPKP memiliki pasar pengawasan yang jelas, yaitu Presiden sebagai *stakeholders* utama dan *stakeholders* birokrasi yang lain yang terdiri dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Methodology Differences

Dengan *new* BPKP perlu terus dikembangkan metodologi pengawasan yang spesifik dan membawa manfaat misalnya program *evaluations*, *policy analysis*, *forensic audit*, *performance audit*, dan *internal control review*.

Dengan wilayah kerja sebanyak 25 (dua puluh lima) Pemerintah Daerah menjadikan tantangan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk mewujudkan strategi penguatan tersebut di atas.

2. Aspek Strategis Internal

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga aspek strategis internal yang berasal dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana.

a. Sumber Daya Manusia

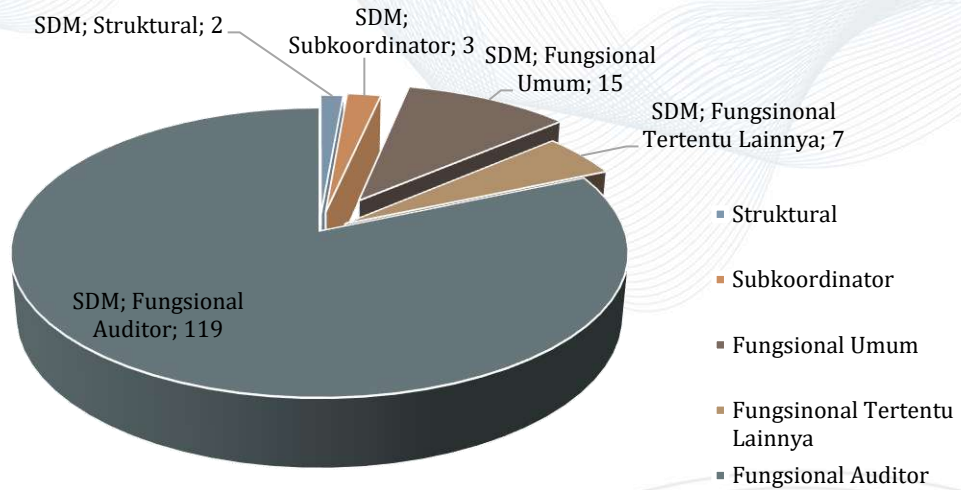
Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per Desember 2023 berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut:



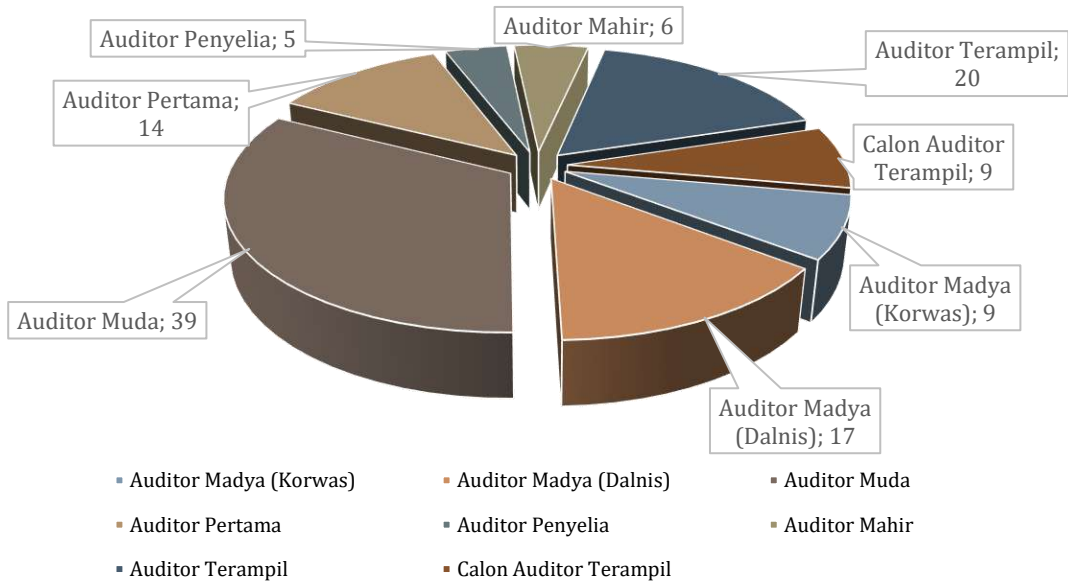
1) Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per Desember 2023 menurut jabatan tercermin sebagai berikut:

SDM Berdasarkan Jabatan



Komposisi Jabatan Fungsional Auditor

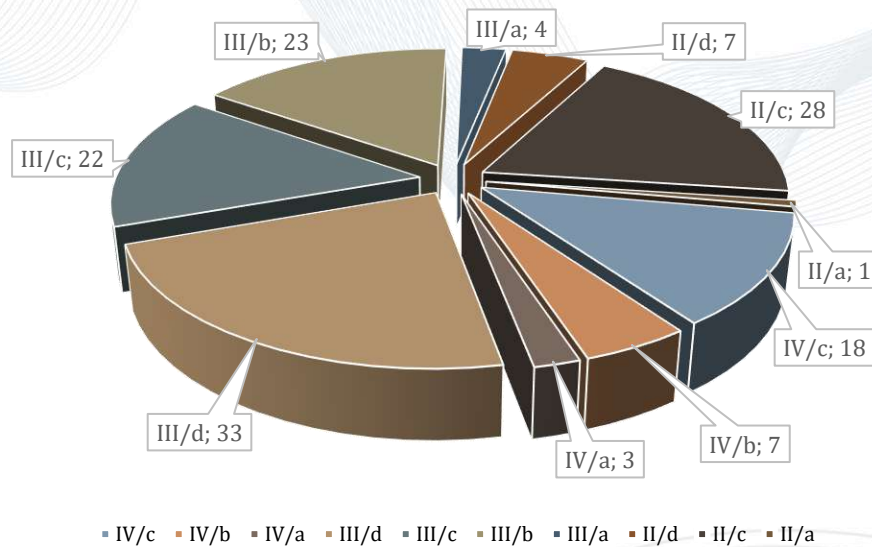


2) Komposisi Pegawai Menurut Golongan

Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per Desember 2023 menurut golongan sebagaimana sebagai berikut:



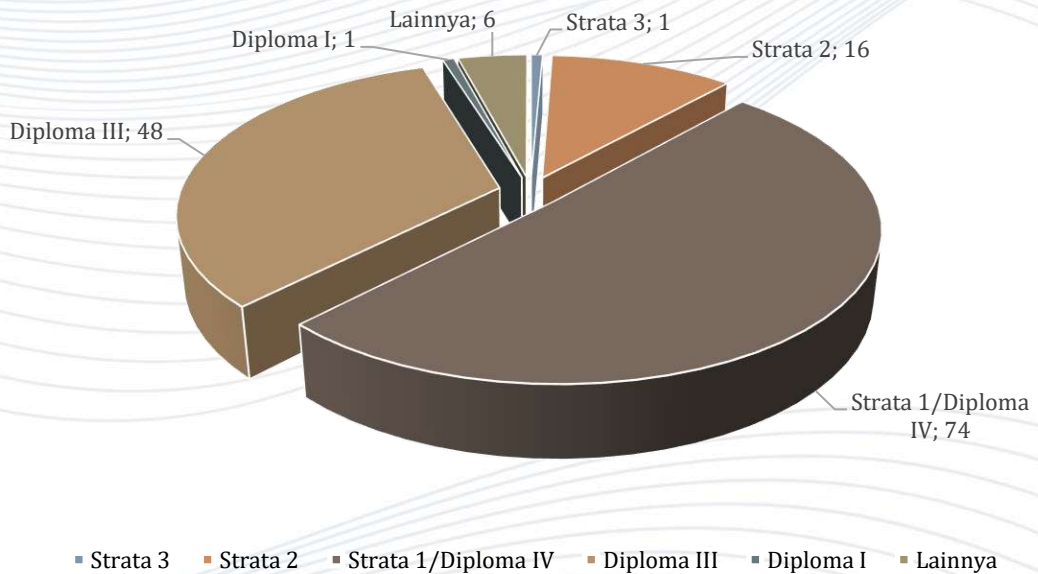
Komposisi Berdasarkan Golongan



3) Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per Desember 2023 menurut berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan



b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin (termasuk didalamnya kendaraan dinas), irigasi dan jaringan. Sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut:



No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Tanah	35.982	M
2	Bangunan	71	Unit
3	Peralatan dan Mesin	2.564	Unit
4	Irigasi	2	Unit
5	Jaringan	1	Unit
6	Mobil Operasional	9	Unit
7	Mobil Ambulance	1	Unit
8	Sepeda Motor	4	Unit

Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan sarana olah raga, ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, dan sarana ibadah.

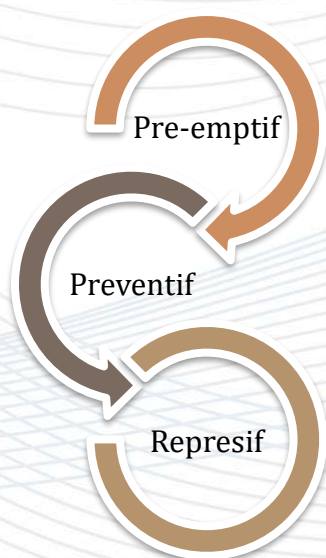
c. Sumber Dana

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2023 sebesar Rp37.683.731.000 yang bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program	Jumlah
1	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan	5.588.343.000
2	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	32.095.388.000
Jumlah		37.683.731.000

D. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

BPKP melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan sebagai berikut:



● Pre-emptif

Kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan *good governance*, pelayanan publik, dan pemberantasan KKN. Sasaran kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit birokrasi yang bersifat laten.

● Preventif

Kelompok kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk memecahkan permasalahan kesisteman

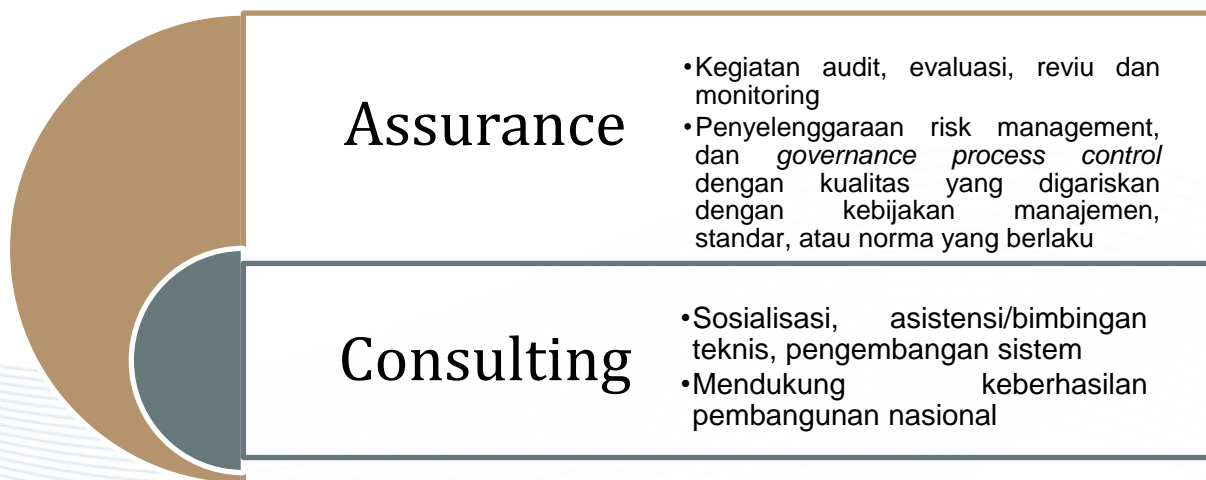


yang memengaruhi penciptaan peringatan dini (*early warning system*) atas proses *governance*, manajemen risiko, dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur manajemen pemerintah. Sasarannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya *moral hazard* di birokrasi.

● Represif

Kelompok kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi perhitungan kerugian negara atas kasus-kasus dengan atau tidak diketemukannya indikasi melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum.

Tiga strategi tersebut kemudian diefektifkan pada dua peran yaitu:



Berdasarkan peran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan turut mengembangkan beberapa produk BPKP yang bermanfaat bagi manajemen perubahan. Selain produk untuk pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60 Tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk unggulan antara lain:

1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan;
2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA);
3. *Good Governance* di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat;
5. Sistem Informasi Akuntansi PDAM;
6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik;
7. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD;
8. Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO;
9. Program Implementasi Penerapan PPK BLU/BLUD;



10. Program Anti Korupsi (PAK);
11. *Fraud Control Plan* (FCP);
12. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP);
13. *Management Assessment Center* (MAC);
14. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (Simkeu-Desa);
15. Program Peningkatan Kapabilitas APiP;
16. Program Peningkatan Tingkat Kematangan SPIP;
17. Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP)
18. Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes)
19. Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas (Sibijak)
20. Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes)

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 melaporkan pencapaian kinerja Tahun 2023 yang diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perkin) 2023. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. TARGET KINERJA 2020-2024

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarah dan pengkoordinasian pengawasan intern serta fungsi pengawasan intern. Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam visi, misi, dan tujuan BPKP dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024.

1. Pernyataan Visi

Untuk melaksanakan amanah tersebut dan dengan mempertimbangkan capaian kegiatan pengawasan periode sebelumnya, potensi dan permasalahan, serta aspirasi masyarakat, maka untuk periode 2020-2024 BPKP mengusung visi:

“Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

2. Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKP melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan:

Misi I: Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan

Misi II: Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

3. Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Untuk menyelenggarakan dua misi tersebut, maka ditetapkan tujuan untuk masing-masing misi tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2024 yaitu:

Tujuan Strategis I: Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional;



Tujuan Strategis II: Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Masing-masing tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam enam sasaran strategis dan 39 (tiga puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai gambaran target *outcome* yang akan dicapai. Penjabaran kedua Tujuan Strategis ke dalam Sasaran Strategis beserta indikator-indikatornya masing-masing adalah sebagai berikut:

Tujuan Strategis I: Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional

Tujuan ini dijabarkan menjadi lima Sasaran Strategis dan 36 (tiga puluh enam) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

a. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah.

Sesuai tugas, fungsi dan perannya, BPKP melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah. Untuk itu ditetapkan sasaran strategis pertama yaitu “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah”.

Sasaran tersebut merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020- 2024 yang mencerminkan anggaran negara dan daerah yang dikelola memiliki manfaat terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan bebas dari penyimpangan keuangan. Sasaran strategis ini diukur dengan enam indikator berupa:

- 1) Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi
- 2) Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi
- 3) Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah
- 4) Nilai Penyelamatan Keuangan Negara.
- 5) Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer
- 6) Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah



b. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Sesuai tugas, fungsi dan perannya, BPKP melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah. Untuk itu ditetapkan sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional”.

Sasaran tersebut merupakan kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan tingkat ketercapaian sasaran pembangunan, program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas strategis dan proyek strategis nasional melalui tugas pengawasan pembangunan. Sasaran Strategis ini diukur dengan tujuh indikator berupa:

- 1) Jumlah Proyek Prioritas (PP) yang Tercapai Sesuai Target;
- 2) Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang Diawasi;
- 3) Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang Tercapai Sesuai Target;
- 4) Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target;
- 5) Jumlah Program Lintas Sektor Pembanguan Daerah yang Tercapai Sesuai Target;
- 6) Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik;
- 7) Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan.

c. Sasaran Strategis III: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha

Berdasarkan tugas, fungsi dan perannya, BPKP melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Untuk itu ditetapkan sasaran strategis ketiga yaitu “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha”.

Sasaran tersebut merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020- 2024 yang



mencerminkan tingkat kontribusi Badan Usaha Milik Negara/Daerah pada negara/daerah baik sebagai pelaksana tugas pembangunan maupun dalam upaya menambah ruang fiskal negara/daerah melalui pendampingan dan pengawasan BPKP. Sasaran Strategis ini diukur dengan lima indikator berupa:

- 1) Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik;
- 2) Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik;
- 3) Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat;
- 4) Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat;
- 5) Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan.

d. Sasaran Strategis IV: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Berdasarkan mandat tugas, fungsi dan perannya, BPKP melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Untuk itu, ditetapkan sasaran strategis keempat yaitu “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi”. Sasaran ini berkaitan dengan peran BPKP sebagai Pembina Penyelenggaraan SPIP, dimana salah satu tujuan pelaksanaan SPIP adalah memastikan tujuan organisasi tercapai dan salah satu risiko terbesar dalam pencapaian tujuan organisasi adalah risiko terjadinya penyimpangan dan korupsi.

Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan sejauh mana upaya dan keberhasilan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Sasaran Strategis ini diukur dengan empat indikator berupa:

- 1) Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti;
- 2) Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti;
- 3) Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik;
- 4) Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik.



e. Sasaran Strategis V: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU

Sesuai tugas, fungsi dan perannya, BPKP dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP, serta melakukan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor. Untuk itu ditetapkan sasaran strategis kelima yaitu “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU”.

Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan melalui pendampingan dan pengawasan BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan sejauh mana tingkat kematangan pelaksanaan pengendalian internal pemerintah dan tingkat kemampuan/kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, BUMN/D dan BLU/D. Sasaran Strategis ini diukur dengan 14 (empat belas) indikator berupa:

- 1) Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3;
- 2) Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3;
- 3) Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3;
- 4) Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3;
- 5) Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel Dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah;
- 6) Tersedianya Rekomendasi Strategis (*Policy Brief*) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 7) Persentase Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
- 8) Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai;
- 9) Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes;
- 10) Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3;
- 11) Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3;
- 12) Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3;
- 13) Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3;
- 14) Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3.



Tujuan Strategis II: Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Sehat dan Akuntabel

Tujuan ini dijabarkan dalam Sasaran Strategis VI: Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas, sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi serta mampu mendukung BPKP dalam mencapai kinerjanya, maka perlu ditetapkan sasaran kinerja yang bersifat “enablers”, yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas dengan tiga Indikator Kinerja Utama.

Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan kemampuan sumber daya internal BPKP mendukung pencapaian visi, misi dan kinerja BPKP. Sasaran Strategis ini diukur dengan tiga indikator berupa:

- a. IA-CM (*Internal Audit Capability Models*) BPKP;
- b. Indeks kesehatan organisasi (IKO); dan
- c. Indikator Nilai Reformasi Birokrasi.

5. Program dan Sasaran Program

Program BPKP merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Program ini merupakan penjabaran dari Tujuan Strategis Kedua dan Sasaran Strategis VI. Tanggungjawab program ini pada Perwakilan BPKP diberikan kepada Unit Kerja Kebiroan yaitu Biro MKOT, Biro SDM, Biro Keuangan, Biro Hukum dan Komunikasi dan Biro Hukum. Program kedua adalah Program 06: Program Pengawasan Pembangunan. Program ini merupakan penjabaran dari Tujuan Strategis Pertama dan lima Sasaran Strategisnya. Tanggungjawab program ini diberikan kepada Unit Kerja Kedeputan, Unit Kerja Perwakilan, Unit Kerja Inspektorat dan Unit Kerja Pusat-pusat.

6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unit kerja eselon II BPKP dimana dalam menyusun target kinerja selalu mengacu kepada target kinerja BPKP 2020-2024. Penyusunan target kinerja dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.



Sasaran program yang termuat dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020-2024 sebanyak 6 (enam) program dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 15 (lima belas) yaitu sebagai berikut: Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memberikan dukungan atas pencapaian Program 01 dan 06 melalui dukungan pencapaian 6 (enam) sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Sifat Target	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah							
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	158	530	758	758	758
1.2	Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	316	884	1.263	1.263	1.263
1.3	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	1.123	186.779	154.487	136.270	112.930
1.4	Nilai penyelamatan keuangan Negara	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	27.124	40.679	49.715	56.500	51.982
1.5	Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	-	118	120	122	125
1.6	Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rp (Juta)	Tidak Kumulatif	-	59	60	61	62
II.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional							
2.1	Jumlah PP yang tercapai sesuai target	Program Prioritas	Tidak Kumulatif	1	5	1	1	1
2.2	Jumlah KP yang diawasi	Kegiatan Prioritas	Tidak Kumulatif	9	7	7	7	7
2.3	Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	Tidak Kumulatif	13	13	13	13	14
2.4	Jumlah PPS yang tercapai sesuai target	Program	Tidak Kumulatif	4	3	3	3	3
2.5	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Program	Tidak Kumulatif	-	1	1	1	1
2.6	Jumlah Program Lintas Sektor Pembanguan Daerah yang Tercapai Sesuai Target	Program	Tidak Kumulatif	-	1	1	1	1
2.7	Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik	Persen	Tidak Kumulatif	-	16,67%	25%	29,17%	33%
2.8	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	Tidak Kumulatif	75%	80%	85%	85%	85%
III.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha							
3.1	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	Kumulatif	-	-	-	-	1
3.2	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	Kumulatif	-	-	-	2	3
3.3	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	Tidak Kumulatif	9	10	10	11	11
3.4	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	Tidak Kumulatif	-	4	4	4	4



No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Sifat Target	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
3.5	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	Kumulatif	-	45	55	69	77
IV	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi							
4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	Tidak Kumulatif	100%	100%	100%	100%	100%
4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	Kumulatif	70%	75%	80%	85%	90%
4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	Tidak Kumulatif	-	-	2	3	4
4.4	Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	BUMD	Tidak Kumulatif	-	-	2	1	2
V	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU							
5.1	Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	APIP	Kumulatif	12	14	17	19	21
5.2	Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	K/L/ Pemda	Kumulatif	16	18	19	20	21
5.3	Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	K/L/ Pemda	Kumulatif	-	-	-	1	1
5.4	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Pemkab /Kota	Kumulatif	1	2	3	4	9
5.5	Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Persen	Kumulatif	0,00%	0,18%	0,37%	1,48%	2,40%
5.6	Tersedianya Rekomendasi Strategis (<i>Policy Brief</i>) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Reko- mendasi	Kumulatif	1	1	1	1	1
5.7	Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	Kumulatif	35%	40,01%	45,02%	50,02%	54,98%
5.8	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara Memadai	Desa	Kumulatif	-	45	111	246	506
5.9	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	Kumulatif	1	5	8	10	12
5.10	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	Kumulatif	-	-	1	2	4
5.11	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	Kumulatif	-	-	-	2	2
5.12	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	Kumulatif	-	3	6	8	11
5.13	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3	BUMD	Kumulatif	-	-	-	2	3



No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Sifat Target	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
VI	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja							
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	Tidak Kumulatif	75	76	77	78	79
6.2	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	Persen	Tidak Kumulatif	100%	100%	100%	100%	100%
6.3	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Persen	Tidak Kumulatif	100%	100%	100%	100%	100%
6.4	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	Persen	Tidak Kumulatif	100%	100%	100%	100%	100%
6.5	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	Tidak Kumulatif	86	87	88	89	90
6.6	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	Persen	Tidak Kumulatif	90	91	92	93	95
6.7	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	Tidak Kumulatif	1	1	1	1	1
6.8	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Predikat Pengelolaan	Tidak Kumulatif	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
6.9	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	Tidak Kumulatif	80	81	82	83	84
6.10	Maturitas SPIP Unit Kerja	Persen	Tidak Kumulatif	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
6.11	Indeks MR Unit Kerja	Level 1-5	Tidak Kumulatif	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
6.12	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Indeks Skala 100	Tidak Kumulatif	70	76	80	81	82
6.13	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	Tidak Kumulatif	70	73	76	80	81

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun



sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	2.021
		1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	137.919
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	113.184
II	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah Proyek Strategi Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1
		2.2	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85
		2.3	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2
III	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1	Persentasi Rekomendasi Strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80
IV	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	4.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	2
		4.2	Jumlah BMUD dengan kinerja sehat	BUMD	11
		4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	4
		4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	69
		4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	5
V	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan /ditindaklanjuti	Persen	100
		5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	85
		5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	6
		5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2
VI	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	1
		6.2	Jumlah APIP Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	21
		6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Provinsi	1
		6.4	Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	20
		6.5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Provinsi	1
		6.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	4
		6.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	8
		6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25
		6.9	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara	Desa	25



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
		memadai		
		6.10 Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	2
		6.11 Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3	BLU/D	8
		6.12 Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BUMD	2
		6.13 Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLU/D	2
VII	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	7.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75
		7.2 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82
		7.3 Persentase efektivitas pengendalian intern Unit Kerja (SPIP Unit kerja)	Persen	70
		7.4 Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100
		7.5 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75
		7.6 Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	95
		7.7 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.



Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja BPKP Tahun 2023. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 menggambarkan capaian kinerja sasaran kegiatan. Capaian indikator kinerja mencerminkan manfaat/hasil dari *output* yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator *input* dan *output*. Indikator kinerja *input* terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM) yang dihitung dengan



penggunaan orang hari (OH) dan indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.

1. Ringkasan Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan atas tujuh sasaran kegiatan dijabarkan ke dalam 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja, menunjukkan bahwa 30 (tiga puluh) indikator kinerja (83,33%) telah mencapai target dan 6 indikator kinerja (16,67%) belum mencapai target.

Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis sebagaimana tercantum pada tabel di bawah:

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah					
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan negara/ daerah yang terealisasi	Rp (Juta)	2.021,00	3.109,64	153,87%	★
1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rp (Juta)	137.919,00	690.663,80	500,77%	★
1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rp (Juta)	113.184,00	146.509,95	129,44%	★
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional					
2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1,00	1,00	100,00%	★
2.2	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	(%) Persen	85,00	100,00	117,65%	★
2.3	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2,00	2,00	100,00%	★
3	Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi Tanggung Jawab Perwakilan					
3.1	Persentase Rekomendasi Strategis yang ditindaklanjuti	(%) Persen	80,00	86,36	107,95%	★
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha					
4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	2,00	2,00	100,00%	★
4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	11,00	12,00	109,09%	★
4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	4,00	4,00	100,00%	★
4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan	BUMDes	69,00	71,00	102,90%	★
4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	5,00	9,00	180,00%	★
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi					



No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	100,00	100,00	100,00%	★
5.2	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	85,00	100,00	117,65%	★
5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	6,00	0,00	0,00%	★
5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Badan Usaha	2,00	2,00	100,00%	★
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU					
6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Provinsi	1,00	0,00	0,00%	★
6.2	Jumlah APIP Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Kab/Kota	21,00	15,00	71,43%	★
6.3	Jumlah Pemprov dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Provinsi	1,00	1,00	100,00%	★
6.4	Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Kab/Kota	20,00	17,00	85,00%	★
6.5	Jumlah Provinsi dengan MRI ≥ Level 3	Provinsi	1,00	0,00	0,00%	★
6.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Kab/Kota	4,00	5,00	125,00%	★
6.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	8,00	0,00	0,00%	★
6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25,00	25,00	100,00%	★
6.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25,00	25,00	100,00%	★
6.10	Jumlah BUMD dengan MRI ≥ Level 3	BUMD	2,00	2,00	100,00%	★
6.11	Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3	BLUD	8,00	12,00	150,00%	★
6.12	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI ≥ Level 3	BUMD	2,00	2,00	100,00%	★
6.13	Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI ≥ Level 3	BLUD	2,00	2,00	100,00%	★
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja					
7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75,00	87,82	117,09%	★
7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,00	82,20	100,24%	★
7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70,00	100,00	142,86%	★
7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	(%) Persen	100,00	100,00	100,00%	★
7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75,00	85,44	113,92%	★
7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	95,00	97,50	102,63%	★
7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80,00	90,12	112,65%	★



2. Perincian Capaian Kinerja

Perincian capaian kinerja Tahun 2023 dapat diuraikan per sasaran kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Sasaran Kegiatan 1

(Dalam Juta Rupiah)



a. IKK 1.1: Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi

IKK “Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi” dihitung berdasarkan hasil kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi evaluasi optimalisasi pendapatan asli daerah dan bimbingan teknis optimalisasi PAD, penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah. Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi diukur dengan menghitung jumlah kurang bayar atas penerimaan negara/daerah yang sudah disetor/ditetapkan.

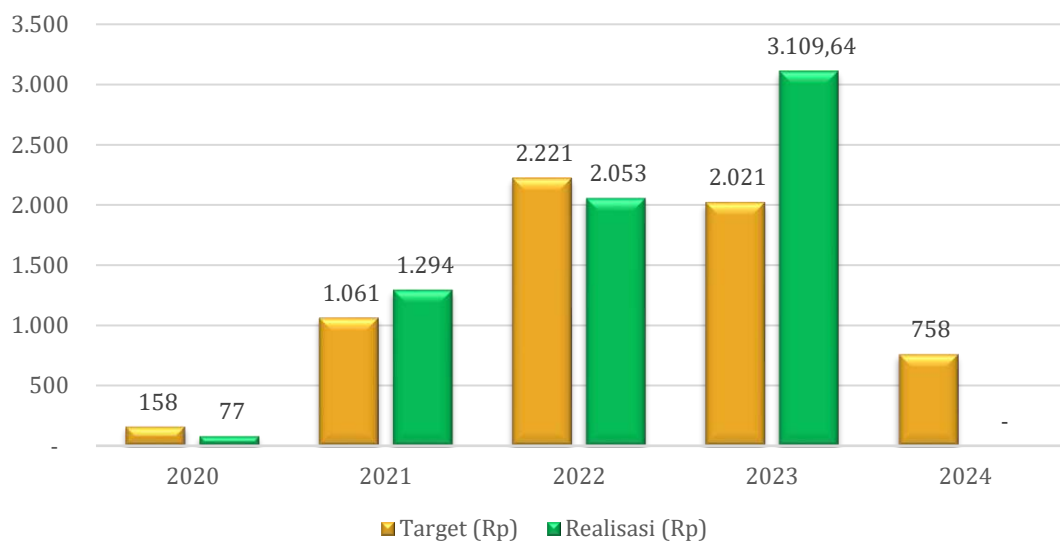
Pada Tahun 2023 nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp3.109.640.169,90 atau mencapai 153,87% dari target tahun 2023 sebesar Rp2.021.000.000,00. Capaian nilai Optimalisasi PAD untuk Kabupaten Pangkep sebesar Rp1.487470.370,00 diperoleh setelah dilakukannya Monitoring Tindak Lanjut atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023. Adapun rinciannya sebagai berikut:



No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	590.764.516,00
2	Pemerintah Kota Palopo	1.028.712.025,90
3	Pemerintah Kabupaten Maros	2.693.258,00
4	Pemerintah Kabupaten Pangkep	1.487.470.370,00
Jumlah		3.109.640.169,90

Apabila dibandingkan dengan target renstra dari tahun 2020-2024, nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi adalah sebagai berikut:

Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi



Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja di atas adalah Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja PAD dan mendorong potensi serta penerimaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. IKK 1.2: Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

IKK “Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah” adalah nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat berdasarkan kegiatan pengawasan BPKP. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah diukur dengan menghitung:

- 1) Nilai anggaran/rencana belanja yang berpotensi menjadi lebih efektif dan efisien dikarenakan:
 - a) Dialihkan ke proyek/kegiatan/program yang lebih berdampak atau lebih hemat;



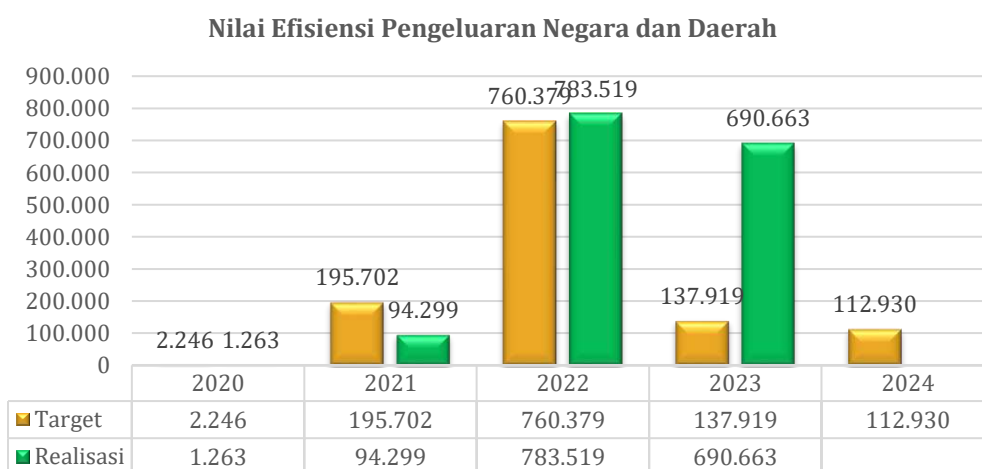
- b) Rincian atau metodologi kegiatan diperbaiki sehingga lebih berdampak atau lebih hemat;
- c) Ukuran/indikator keberhasilan diperbaiki sehingga lebih terukur dan berorientasi hasil.

2) Nilai rupiah yang dapat dihemat melalui hasil pengawasan BPKP yang bersifat non-investigatif seperti audit klaim/verifikasi tagihan, koreksi *cost-recovery*, audit penyesuaian harga, audit *cost-saving*, dsb.

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp690.663.808.749,00 atau mencapai 500,77% dari target tahun 2023 sebesar Rp137.919.000.000,00. Ringkasan nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah sebesar Rp690.663.808.749,00 disajikan pada tabel:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Potensi inefektifitas dan inefisiensi berdasarkan evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD	579.006.133.522,63
2.	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil audit	23.322.908.471,51
3.	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil evaluasi	33.824.971.630,00
4.	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil reuiu	54.509.795.124,86
Jumlah		690.663.808.749,00

Apabila dibandingkan dengan target renstra dari tahun 2020-2024, nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah adalah sebagai berikut:



Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah” antara lain:



1) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran APBD di Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sekaligus memberikan saran perbaikan atas keselarasan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran termasuk nilai program yang tidak optimal.



Pada tahun 2023 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan evaluasi sebanyak 2 (dua) kali. Pertama kali evaluasi dilakukan pada triwulan I tahun 2023 dengan scope Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemkab Pangkajene Kepulauan, Selayar, dan Bone. Kedua, evaluasi dilakukan pada triwulan IV tahun 2023 pada seluruh pemerintah daerah yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ada 5 sektor yang dievaluasi yaitu Pengentasan Kemiskinan, Penanganan Stunting, Pemberdayaan UMKM, Daya Saing Pariwisata, dan Ketahanan Pangan. Atas kelima sektor ini, pemda membuat pernyataan atau asersi terkait program/kegiatan/subkegiatan yang menurut pemda mengintervensi sektor-sektor tersebut. Pengujian dilakukan terhadap *ultimate outcome*, program, kegiatan, subkegiatan untuk melihat efektivitas dan efisiensinya.



Dari 25 (dua puluh lima) Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan terdapat potensi Nilai Program Tidak Optimal untuk masing-masing Pemda sebagai berikut:

No	Sektor Evaluasi	Anggaran Belanja (Rp)	Nilai Program Tidak Optimal (Rp)	Persentase (%)
1.	Pariwisata	889.316.634.654,00	78.954.770.142,90	8.88
2.	Ketahanan Pangan	1.530.591.035.981,00	20.295.769.164,73	1.33
3.	UMKM	326.081.022.730,00	9.410.906.812,00	2.89
4.	Pengentasan Kemiskinan	3.542.429.185.470,00	370.702.876.646,00	10.46
5.	Penanganan Stunting	1.814.234.150.619,00	99.641.810.757,00	5.49
Jumlah		8.102.652.029.454,00	579.006.133.522,63	7.15

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, BPKP telah merekomendasikan:

- a) Melakukan internalisasi secara intensif mengenai peraturan-peraturan terkait penyusunan dokumen perencanaan kepada seluruh OPD;
 - b) Meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah melalui perbaikan kualitas sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan mengenai sasaran, indikator kinerja serta target kinerja;
 - c) Meningkatkan efisiensi penganggaran di setiap OPD dengan mengadopsi prinsip "*Money follow Program*" dimana setiap belanja yang dianggarkan adalah belanja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan program, bukan hanya melaksanakan kegiatan.
- 2) Kegiatan Audit

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil audit Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

No	Jenis Audit	Koreksi Audit (Rp)
1	Audit Tujuan Tertentu atas Kewajaran Volume Paket Pekerjaan Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Makassar Zona Barat Laut (Paket C-1 dan C-2)	527.279.062,97
2	Audit Tujuan Tertentu atas Pekerjaan Penanggulangan Bencana Banjir Sungai Bila Kabupaten Sidrap	111.277.167,09
3	Audit Tujuan Tertentu atas Pekerjaan Penanggulangan Bencana Banjir Sungai Rongkong Kabupaten Luwu Utara	295.892.000,00
4	Audit tujuan tertentu atas pekerjaan tanggap darurat bencana alam dan tanah longsor saluran induk D.I Kelara-Karalloe Kab. Jeneponto	112.406.652,12



No	Jenis Audit	Koreki Audit (Rp)
5	Audit atas Pekerjaan Pembangunan Bendungan Pamukkulu Paket 1 dan Paket 2 Kabupaten Takalar	2.656.155.672,87
6	Audit Klaim atas Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Bencana Banjir Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan pada Balai Besar Sungai Pompengan Jeneberang Tahun 2022	447.321.733,45
7	Audit Penyesuaian Harga	19.172.576.183,01
Total		23.322.908.471,51

3) Kegiatan Evaluasi

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

No	Jenis Evaluasi	Nilai Efisiensi (Rp)
1	Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar	12.231.895.000,00
2	Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar	51.120.000,00
3	Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan 2023 dan 2024 pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan	15.116.325.000,00
4	Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan 2023 dan 2024 pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	3.318.396.000,00
5	Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros	1.085.290.000,00
6	Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Maros	2.010.018.000,00



No	Jenis Evaluasi	Nilai Efisiensi (Rp)
7	Evaluasi atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah pada Kota Parepare Tahun 2022-2023 dengan hasil evaluasi yaitu terdapat sisa dana BOS pada madrasah uji petik tahun 2022	11.927.630,00
Total		33.824.971.630,00

Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan) Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kota Makassar dengan rincian permasalahan dan nilai efisiensi sebagai berikut:

KPU/Bawaslu	Uraian Permasalahan	Nilai Efisiensi (Rp)
KPU	Anggaran pada komponen/sub-komponen yang tidak sesuai dengan RO atau yang dapat dipersamakan dengan RO serta substansi kegiatan	246.372.000,00
KPU	Anggaran atas item-item biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan	4.774.250.000,00
KPU	Anggaran atas volume item biaya yang tidak wajar	1.240.000.000,00
KPU	Anggaran dengan harga satuan melebihi SBM/SBML/Harga Pasar	4.413.673.000,00
KPU	Terdapat duplikasi alokasi anggaran item-item biaya antar kegiatan	1.557.600.000,00
Total		12.231.895.000,00
Bawaslu	Duplikasi alokasi anggaran item-item biaya dengan DIPA Pemilu	51.120.000,00
Total		51.120.000,00

Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan 2023 dan 2024 pada KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan perincian permasalahan dan nilai efisiensi sebagai berikut:

KPU/Bawaslu	Uraian Permasalahan	Nilai Efisiensi (Rp)
KPU	Anggaran atas item-item biaya yang tidak sesuai ketentuan	2.211.600.000,00
KPU	Anggaran atas volume item biaya yang tidak wajar	4.751.241.000,00
KPU	Anggaran dengan harga satuan melebihi SBM/SBML/Harga Pasar	2.783.041.000,00
KPU	Duplikasi alokasi anggaran item-item biaya dengan DIPA Pemilu	5.370.443.000,00
Total		15.116.325.000,00



Bawaslu	Anggaran atas item-item biaya yang tidak sesuai ketentuan	516.650.000,00
Bawaslu	Anggaran atas volume item biaya yang tidak wajar	9.400.000,00
Bawaslu	Anggaran dengan harga satuan melebihi SBM/SBML/Harga Pasar	12.790.000,00
Bawaslu	Duplikasi alokasi anggaran item-item biaya dengan DIPA Pemilu	2.779.556.000
Total		3.318.396.000,00

Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada KPU dan Bawaslu Kabupaten Maros dengan rincian permasalahan dan nilai efisiensi sebagai berikut:

KPU/Bawaslu	Uraian Permasalahan	Nilai Efisiensi (Rp)
KPU	Anggaran pada komponen/sub-komponen yang tidak sesuai dengan RO atau yang dapat dipersamakan dengan RO serta substansi kegiatan	152.000.000,00
KPU	Anggaran atas item-item biaya yang tidak sesuai ketentuan	774.418.000,00
KPU	Anggaran atas volume item biaya yang tidak wajar	1.083.600.000,00
Total		2.010.018.000,00
Bawaslu	Terdapat item belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan	304.500.000,00
Bawaslu	Terdapat volume item biaya yang tidak wajar	641.550.000,00
Bawaslu	Terdapat duplikasi alokasi anggaran item-item biaya dengan DIPA Pemilu	139.240.000,00
Total		1.085.290.000,00

4) Kegiatan Reviu

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil reviu adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
1	Reviu atas Usulan Addendum Pekerjaan Trunk Sewer Jacking Pipe Diameter 1.000 mm pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan	31.365.874.153,48
2	Reviu atas Pekerjaan Tebing sisi Kanan Bendungan Bili Bili pada Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Pompengan Jeneberang Privinsi Sulawesi Selatan	283.845.292,83
3	Reviu atas Rencana Penambahan Anggaran atas Pekerjaan Penyelesaian (Pemenuhan Output) Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase Kanan 1 (Paket III)	22.270.140.134,73



No.	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
	Kabupaten Luwu Utara pada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang untuk TA 2024	
4	Reviu atas Tunggakan Pembayaran Paket Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan dalam Kota Makassar (PPK 3.2), Paket Preservasi Jalan dan Jembatan Kab. Pangkep-Kab. Barru-Kota Parepare (PPK 3.3) dan Paket Preservasi Jalan dan Jembatan BTS. Kab. Maros-Ujung Lamuru-Watampone (PPK 3.4) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Balai Besar PJN Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022	589.935.543,82
Jumlah		54.509.795.124,86

c. IKK 1.3: Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

IKK “Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah” adalah nilai yang menunjukkan besarnya jumlah temuan pengembalian ke kas negara atas belanja yang sudah direalisasikan dan/atau pemulihan hak negara atas aset negara.

Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah diukur dengan menghitung nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan nilai aset yang dipulihkan.

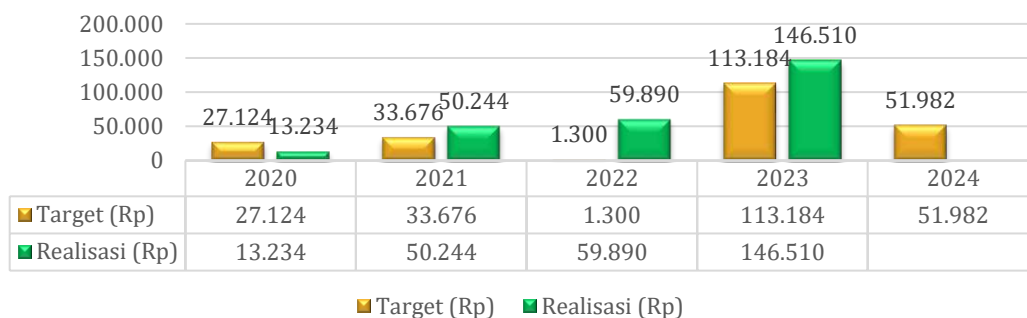
Nilai penyelamatan keuangan Negara dan Daerah berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp146.509.953.440,85 atau mencapai 129,44% dari target tahun 2023 sebesar Rp113.184.000.000,00. Ringkasan Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah sebesar Rp146.509.953.440,85 disajikan pada tabel:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah berdasarkan hasil audit	145.969.871.009,67
2.	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah berdasarkan hasil reviu	311.482.431,18
3.	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah berdasarkan hasil evaluasi	228.600.000,00
Jumlah		146.509.953.440,85

Apabila dibandingkan dengan target renstra dari tahun 2020-2024, nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah adalah sebagai berikut:



Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah



Dari grafik diatas diketahui persentase nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2024, nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi telah melampaui target yang diharapkan.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah” antara lain:

1) Audit atas Laporan Keuangan

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Pengawasan atas proyek yang dibiayai oleh Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri dalam bentuk Audit Dukungan Laporan Keuangan. Audit ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan proyek, efektivitas sistem pengendalian intern proyek, dan serta ketaatan terhadap ketentuan proyek yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Program/*Project Implementation Unit*.

Audit laporan keuangan dilakukan pada beberapa program dan menunjukkan nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah dalam bentuk rekomendasi penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp118.542.759,27, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Nilai (Rp)
1	Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Dam Operational and Safety Project Phase II /DOISP II (Loan IBRD No.8711 ID dan Loan AIIB No. 000010-1-IDN) pada PIU Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang untuk Tahun Anggaran yang Berakhir per 31 Desember 2022	6.323.987,61



No.	Nama Program	Nilai (Rp)
2	Audit Independen atas Program KOTAKU / NSUP Loan IBRD 8636 ID pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2022 (BOP)	4.229.600,00
3	Audit Independen atas Program KOTAKU / NSUP Loan IBRD 8636 ID pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2022	30.420.462,94
4	Audit Independen atas Audit atas Laporan Keuangan Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) Loan IFAD No.200001445 pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022	450.000,00
5	Audit atas Laporan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)/National Slum Upgrading Project (NSUP) Loan IBRD No 8636 dan Loan AIIB 0004-IDN pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023	77.118.708,72
Jumlah		118.542.759,27

2) Audit Lainnya (Kinerja dan Operasional)

Pengawasan dalam bentuk audit lainnya berupa audit kinerja atas program pembangunan infrastruktur. Audit ini bertujuan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan atau penyelenggaraan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Wilayah dan atas pembangunan infrastruktur lainnya. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah dalam bentuk rekomendasi penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp4.766.705.234,33, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Nilai (Rp)
1	Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022	11.700.800,00
2	Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022	35.510.400,00



No.	Nama Program	Nilai (Rp)
3	Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan di Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022	5.294.312,00
4	Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah/PISEW (Uji Petik Kabupaten Takalar) pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022	10.347.676,50
5	Audit atas Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Yayasan Putra Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 Pada Provinsi Sulawesi Selatan	254.531.387,83
6	Audit atas Pengadaan Jembatan Rangka Baja Permanen Longsoran Palopo (UMYC) Tahun 2023 pada Provinsi Sulawesi Selatan	169.041.635,95
7	Audit atas Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan UIN Alauddin Makassar Tahun 2023 pada Provinsi Sulawesi Selatan	4.143.604.447,83
8	Audit Tujuan Tertentu atas Kewajaran Volume Paket Pekerjaan Pembangunan Perpipa-an Air Limbah Kota Makassar Zona Barat Laut (Paket C-1 dan C-2)	136.674.574,22
Jumlah		4.766.705.234,33

3) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah adalah melalui audit investigasi dan audit penghitungan kerugian keuangan negara di Wilayah Sulawesi Selatan yang dilakukan untuk memenuhi permintaan penyidik/aparat penegak hukum di Provinsi Sulawesi Selatan.

Audit ini bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan sesuai hasil penyidikan oleh APH dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pengawasan berupa audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah sebanyak 14 (empat belas) penugasan dengan nilai penyelamatan keuangan negara/daerah sebesar Rp141.084.623.016,07 yang terdiri dari:



No	Sumber Dana	Jumlah Penugasan	Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	APBN	3	83.531.647.177,53
2	APBD	4	49.124.250.329,54
3	APBDesa	2	808.800.509,00
4	BUMN	5	7.619.925.000,00
Jumlah		14	141.084.623.016,07

4) Reviu

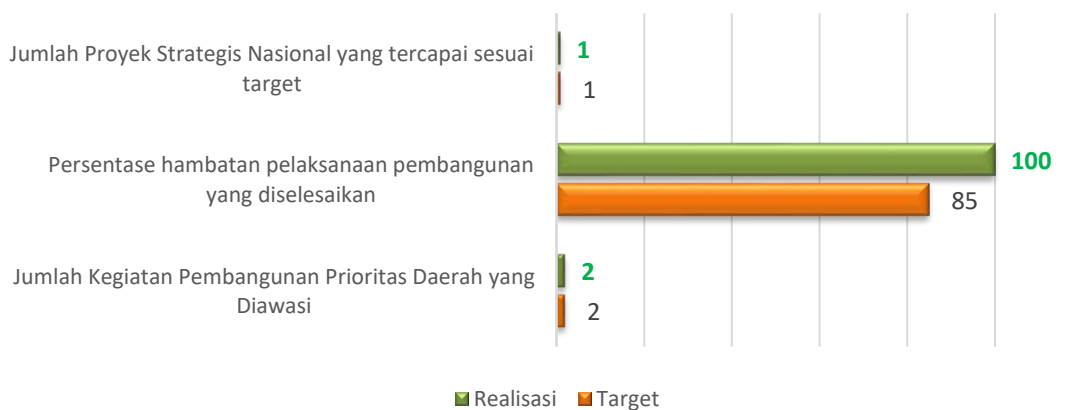
Reviu Paket Pekerjaan Rumah Susun ASN Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan hasil reviu terjadi kelebihan perhitungan nilai progres Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun ASN Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp311.482.431,18.

5) Evaluasi

Evaluasi Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Rumah Susun dan Rumah Khusus, Bantuan Stimulan Perumahan Rakyat) pada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dengan hasil evaluasi yaitu terdapat kekurangan volume pekerjaan pembangunan rumah susun senilai Rp228.600.000,00.

2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

Sasaran Kegiatan 2



a. IKK 2.1: Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target

IKK “Jumlah PSN yang tercapai sesuai target” adalah Jumlah PSN yang tercapai targetnya sesuai target kinerja sesuai dokumen perencanaan yang sah. Indikator ini digunakan untuk menilai keberhasilan Proyek Strategis Nasional dalam mencapai target yang ditetapkan.



Pada Tahun 2023 target kinerja ini adalah 1 PSN. Capaian realisasi kinerja atas Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah sebanyak 1 PSN atau sebesar 100% dari target. Aktivitas pengawasan yang mendukung pencapaian target “Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target” oleh Bidang Akuntan Negara I adalah Reviu Tata Kelola PSN yang dilaksanakan untuk periode pengawasan Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2023 pada satu Proyek Strategis Nasional yaitu pembangunan Makassar New Port.



- b. IKK 2.2: Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan IKK “Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan” diukur dengan jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha (KLPBU) yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dibagi dengan jumlah rekomendasi hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (Evaluasi HKP).

Hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan sebanyak dua rekomendasi, diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas Klaim RSUD Pongtiku dengan BPJS Kesehatan Cabang Makale dan Mediasi Tindak Lanjut Penyelesaian Kesepakatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi dan Pembangunan Rumah Pompa di Kawasan KIMA.

Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 85%. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 telah mencapai 117,65%.

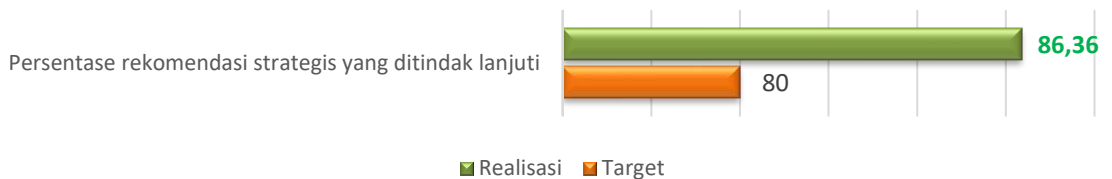


c. IKK 2.3: Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” diukur dengan jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi dibandingkan dengan jumlah topik APPD.

Pada tahun 2023 jumlah kegiatan pembangunan prioritas yang diawasi berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi sebanyak 2 (dua) kegiatan pembangunan prioritas daerah atau mencapai 100% dari target tahun 2023 sebanyak 2 kegiatan. Adapun kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi yakni: 1) Evaluasi Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Guna Mengatasi Kesenjangan Antar Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan; dan 2) Evaluasi Optimalisasi Produksi Garam Rakyat.

3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Pada KLD/BU yang Menjadi Tanggungjawab Perwakilan

Sasaran Kegiatan 3



KK 3.1: Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti

IKK “Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti” diukur dengan menghitung banyaknya rekomendasi strategis yang dihasilkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan kepada *stakeholders* terkait yang ditindaklanjuti. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan sejauhmana perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang di sampaikan kepada *stakeholders* yakni provinsi/kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti.

Pada tahun 2023, persentase rekomendasi strategis yang telah ditindaklanjuti sebesar 86,36% atau mencapai 107,95% dari target tahun 2023 sebesar 80%.



4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangun atas Badan Usaha

Sasaran Kegiatan 4



a. IKK 4.1: Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik

IKK jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik diukur dengan jumlah BUMD yang pengelolaan korporasinya minimal berpredikat “Baik” yang ada di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan tata kelola BUMD.

Realisasi capaian jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasi yang baik tahun 2023 sebanyak 2 BUMD dari target sebanyak 2 BUMD atau 100%. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan assessment penerapan GCG terhadap 2 (dua) BUMD Jasa Air tahun 2023 yang seluruhnya telah memperoleh predikat “Baik”.

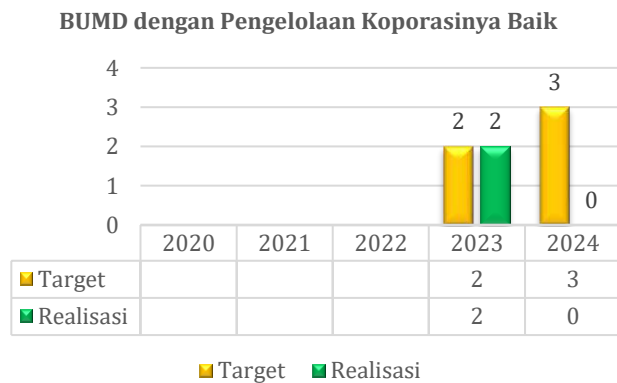
Ringkasan Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasi yang baik disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama BUMD	Skor GCG	Predikat
1	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo	75,01	Baik
2	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare	75,06	Baik

Perkembangan realisasi jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasi yang baik tahun 2023, dan perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut:



Dari gambar tersebut, jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasi yang baik sebanyak 2 atau 100% dari target 2 BUMD. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024, jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasi yang baik baru mencapai 66,67%.



b. IKK 4.2: Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

IKK jumlah BUMD dengan kinerja sehat diukur dengan menghitung jumlah BUMD dengan kinerja minimal “Sehat” dari jumlah BUMD yang ada dilakukan pengawasan di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan kinerja pengelolaan BUMD. Pemenuhan target kinerja tahun 2023 dilaksanakan dengan pengawasan pada BUMD Jasa Air dan BUMD Aneka Usaha.

Penilaian kinerja BUMD Jasa Air merupakan upaya untuk melihat dan mengukur tingkat kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana efisiensi dan efektifitas pengelolaannya. Hasil penilaian kinerja ini dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan/ *stakeholders* untuk menyusun kebijakan dan strategi peningkatan kinerja BUMD Jasa Air.

Pada tahun 2023 target jumlah BUMD dengan kinerja sehat sebanyak 11 (sebelas) BUMD. Pelaksanaan evaluasi kinerja telah dilaksanakan pada 23 (dua puluh tiga) PDAM/PERUMDAM di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Buku 2022. Hasil evaluasi menunjukkan jumlah BUMD dengan kinerja sehat sebanyak 12 PDAM/PERUMDAM atau mencapai 109,09% dari target tahun 2023 sebesar 11 PDAM/PERUMDAM, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

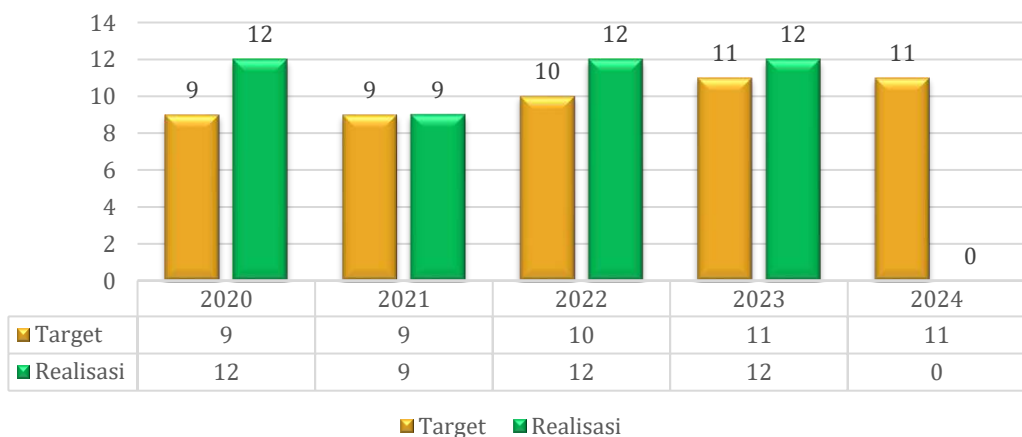
No	Nama PDAM	Jumlah Hasil Penilaian	Tingkat Kesehatan
1	Perumda Air Minum Kota Makassar	3,24	Sehat
2	Perumda Air Minum Tirta Bantimurung Kab Maros	3,18	Sehat
3	Perumda Air Minum Tirta Mangkaku Kota Palopo	3,77	Sehat



No	Nama PDAM	Jumlah Hasil Penilaian	Tingkat Kesehatan
4	Perumda Air Minum Tirta Sinjai Bersatu Kab Sinjai	2,81	Sehat
5	Perumda Air Minum Kabupaten Toraja Utara	2,95	Sehat
6	PDAM Tirta Jeneberang Kab Gowa	3,18	Sehat
7	PDAM Kab Takalar	2,94	Sehat
8	PDAM Kota Parepare	3,39	Sehat
9	PDAM Tirta Bukae Kab Luwu Utara	2,98	Sehat
10	PDAM Tirta Massenrempulu Kab Enrekang	2,96	Sehat
11	PDAM Kab Luwu	2,60	Kurang Sehat
12	PDAM Kab Luwu Timur	2,87	Sehat
13	PDAM Kab Bantaeng	2,47	Kurang Sehat
14	PDAM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1,88	Sakit
15	PDAM Kabupaten Soppeng	1,83	Sakit
16	PDAM Kabupaten Wajo	2,55	Kurang Sehat
17	PDAM Tirta Nenemallomo Kab Sidenreng Rappang	2,40	Kurang Sehat
18	Perumda Air Minum Tirta Waesai Kab Barru	2,89	Sehat
19	PDAM Kabupaten Jeneponto	2,45	Kurang Sehat
20	PDAM Kabupaten Tana Toraja	2,31	Kurang Sehat
21	PDAM Wae Manurung Kab Bone	2,61	Kurang Sehat
22	PDAM Kabupaten Kepulauan Selayar	2,03	Sakit
23	PDAM Kabupaten Bulukumba	1,68	Sakit
24	PDAM Kabupaten Pinrang	Tidak Dievaluasi	

Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2024 sebanyak 11 PDAM/PERUMDAM, jumlah BUMD dengan kinerja sehat telah mencapai 109,09%.

BUMD dengan Kinerja Sehat



Adapun terhadap BUMD Aneka Usaham pada tahun 2023 telah dilaksanakan evaluasi kinerja pada 3 (tiga) BUMD Aneka Usaha, namun belum ada yang berkinerja Baik, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Nama BUMD Aneka Usaha	Hasil Penilaian	Tingkat Kesehatan
1	PD Pasar Kota Makassar	42,90	Kurang Sehat
2	PD Terminal Kota Makassar	51,60	Kurang Sehat
3	PD RPH Kota Makassar	21,90	Tidak Sehat

c. IKK 4.3: Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat

Jumlah BLUD dengan kinerja minimal “Sehat” diukur dengan jumlah BLUD dengan kinerja minimal “Sehat” dari jumlah BLUD yang dilakukan pengawasan di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan kinerja pengelolaan BLUD. Target kinerja ini pada tahun 2023 sebanyak 4 (empat) BLUD.

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pengelolaan RSUD BLUD. Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan evaluasi kinerja pada 4 (empat) BLUD Rumah Sakit di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Buku 2022, dengan hasil seluruhnya berkinerja sehat atau mencapai 100% dari target tahun 2023, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Nama BLUD	Hasil Penilaian	Tingkat Kesehatan
1.	RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan	71,00	Baik/Sehat
2.	RSUD Lasirang Kab Pinrang	82,50	Baik/Sehat
3.	RSUD K.H Hayyung Kab Kepulauan Selayar	71,50	Baik/Sehat
4.	RSUD Batara Guru Kab Luwu	78,40	Baik/Sehat

Perkembangan realisasi jumlah BLUD dengan kinerja sehat tahun 2023, dibandingkan dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada grafik.



Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2024, jumlah BLUD dengan kinerja sehat telah mencapai 100%.

d. IKK 4.4: Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan

Jumlah BUM Desa yang mampu menyusun laporan keuangan diukur dengan jumlah BUM Desa di Provinsi Sulawesi Selatan yang mampu menyusun laporan keuangan setelah adanya pendampingan oleh BPKP dan telah di input pada aplikasi Pandan Desa.

Jumlah BUM Desa yang mampu menyusun laporan Keuangan berdasarkan hasil pengawasan berupa monitoring aplikasi pandan desa oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah sebanyak 71 BUM Desa atau 102,90% dari target kumulatif sampai dengan tahun 2023 sebanyak 69 BUM Desa. Ringkasan Jumlah BUM Desa yang telah menyusun laporan keuangan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama Kabupaten	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun LK
1	Bulukumba	8
2	Gowa	29
3	Maros	21
4	Sidrap	8
5	Takalar	5
Jumlah		71

Perkembangan realisasi jumlah BUM Desa yang mampu menyusun laporan keuangan dan perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut:



Dari gambar diatas, jumlah BUM Desa yang telah menyusun laporan keuangan telah mencapai 102,90%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2024, jumlah BUM Desa yang telah menyusun laporan keuangan telah mencapai 92,21%.



e. IKK 4.5: Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa

Pada Tahun 2023, jumlah BUM Desa yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa sebanyak 9 (sembilan) BUM Desa dari target tahun 2023 sebanyak 5 (lima) BUM Desa atau mencapai 180%, dengan rincian sebagaimana disajikan sebagai berikut:

No	Nama BUM Desa	Kontribusi BUM Desa ke Desa (Rp)
1	BUMDesa Karya Sejati	7.049.703,00
2	BUMDesa Sipakenre	1.600.000,00
3	BUMDesa Al-Akram	1.760.000,00
4	BUMDesa Jenetaesa	7.595.000,00
5	BUMDesa Bumi Paccelekang Sejahtera	4.628.721,00
6	BUMDesa Minasa Baji Panrannuangta	2.271.150,00
7	BUMDesa Maju Bersama	6.230.000,00
8	BUMDesa Jaya Sejati	845.000,00
9	BUMDesa Sipakainga	14.735.000,00

5. Sasaran kegiatan 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi



a. IKK 5.1: Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti

IKK “Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti” diukur dengan jumlah



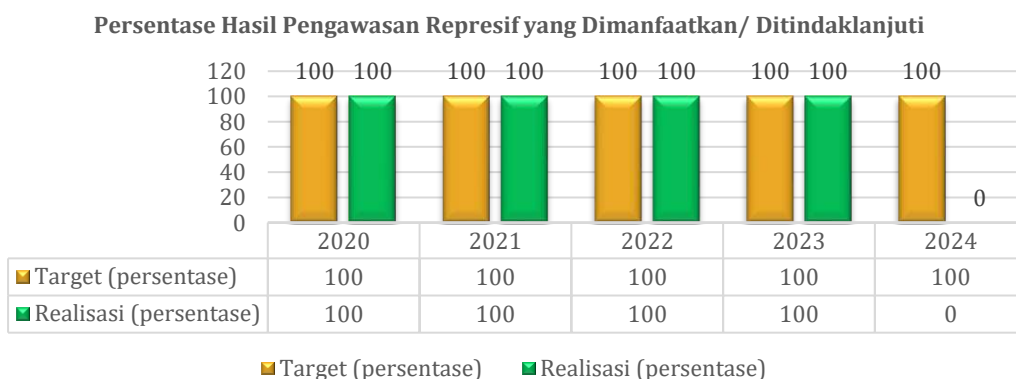
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/ Aparat Penegak Hukum (KLPBU/APH) yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan represif (audit investigasi, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan audit tujuan tertentu lainnya bidang investigasi) dibagi dengan jumlah penugasan pengawasan represif yang telah dilaksanakan BPKP.

Dalam hal penugasan bersumber dari Aparat Penegak Hukum (APH), tindak lanjut yang dimaksud adalah digunakannya laporan hasil audit sebagai bukti surat dalam berkas penyelidikan/penyidikan/penuntutan. Sedangkan, dalam hal penugasan bersumber dari K/L/P/BU, tindak lanjut dimaksud adalah tindakan korektif dan/atau tindak lanjut hukum sebagaimana dinyatakan dalam rekomendasi.

Sebanyak 55 (lima puluh lima) penugasan represif yang telah dilaksanakan, semuanya telah dimanfaatkan/ditindaklanjuti pada tahun 2023 dengan demikian persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti telah mencapai 100% dari target tahun 2023 sebesar 100%.

Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti tahun 2023 diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, yakni penyidik menindaklanjuti penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan pemberian keterangan ahli di hadapan penyidik dan persidangan.

Realisasi persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti selama periode tahun 2020-2023 telah mencapai 100% dari target yang terlihat pada grafik.



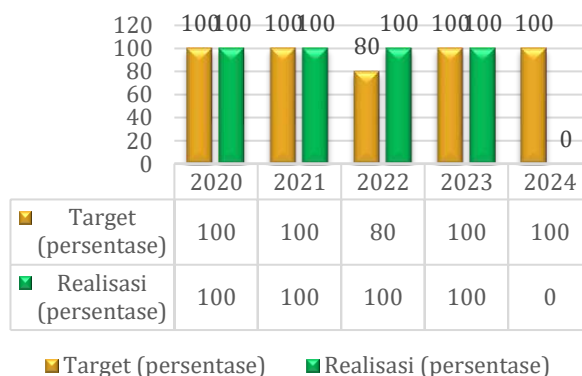
Capaian kinerja yang sesuai target antara lain didukung koordinasi yang baik dengan APH, sehingga tindak lanjut atas hasil-hasil audit investigatif dan atau audit penghitungan kerugian keuangan negara dapat berjalan efektif.



b. IKK 5.2: Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

IKK “Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan atau Ditindaklanjuti” diukur dengan jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha (KLPBU) yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan preventif dan edukatif dibagi dengan jumlah penugasan pengawasan preventif dan edukatif. Pengawasan preventif terdiri dari Profiling Risiko *Fraud* dan bimbingan teknis *Fraud Control Plan* (FCP) sedangkan pengawasan edukatif berupa pembentukan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dan *Coaching Clinic*.

Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti



Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 85%. Pada Tahun 2023, hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi dari 6 penugasan atau mencapai 117,65% dari target tahun 2023. Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, berupa 5 kegiatan *coaching clinic* dan 1 kegiatan pembentukan MPAK. Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 yang mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

- 1) Meningkatkan kompetensi auditor dengan mengikutsertakan pada Diklat FCP.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi melalui kegiatan yang bersifat preventif dan edukatif.

c. IKK 5.3: Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

IKK “Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” diukur dengan skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang merupakan komposit skor atas tiga pilar: kapabilitas, keberterapan (*implementedness*) strategi pencegahan, dan penanganan keterjadian.



Pada tahun 2023 telah dilakukan ekspose hasil penilaian SPIP yang salah satu bagiannya adalah penilaian IEPK. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 25 pemda, belum terdapat pemda yang memperoleh IEPK level 3 atau capainnya 0% dari target tahun 2023 yakni sebanyak 6 Pemda. Hal ini disebabkan oleh belum diimplementasikannya kebijakan WBS/WBBK pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

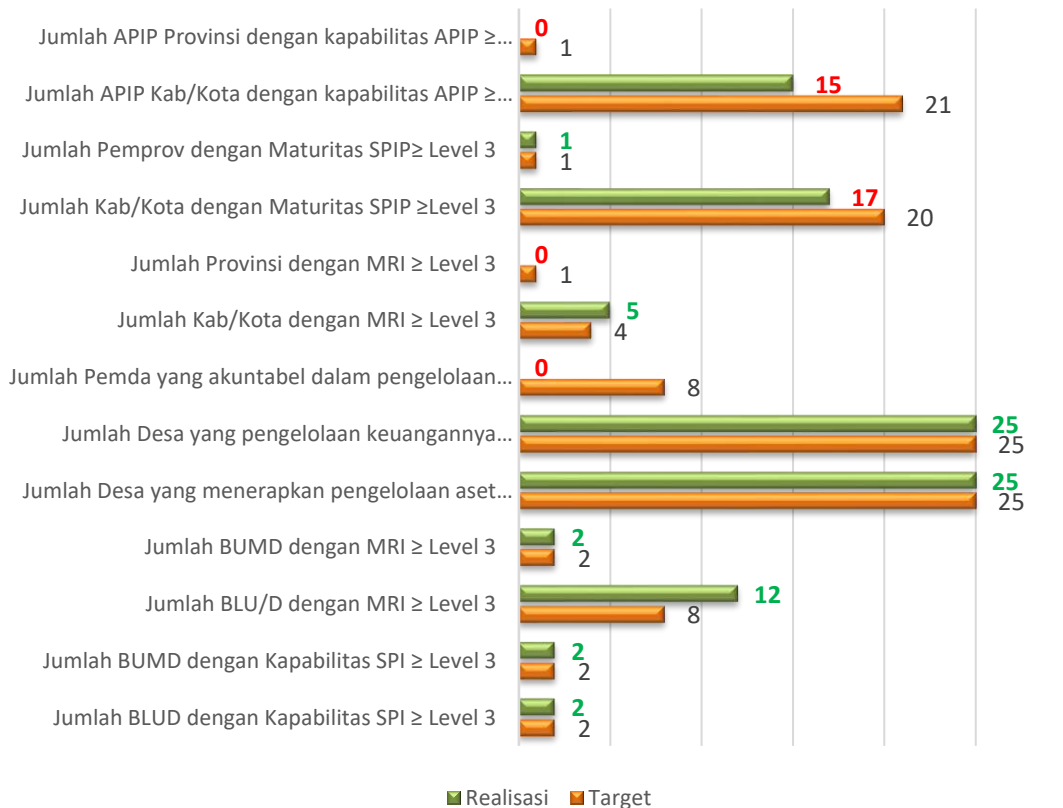
Upaya-upaya yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut adalah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi serta melakukan monitoring program efektivitas pengendalian korupsi kepada Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

- d. IKK 5.4: Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik
- IKK “Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” diukur dengan jumlah Badan Usaha yang menerapkan Fraud Control Plan (FCP) berdasarkan hasil pendampingan atau bimbingan teknis yang dilakukan oleh BPKP. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdapat sebanyak 2 badan usaha yang telah menerapkan FCP yaitu PT KIMA dan PT Perkebunan Nusantara XIV, atau telah mencapai 100% dari target tahun 2023. Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 yang mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain secara proaktif mendorong Badan Usaha di Sulawesi Selatan agar menerapkan program/ kebijakan Anti Fraud secara efektif.



6. Sasaran kegiatan 6: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU

Sasaran Kegiatan 6



a. IKK 6.1: Jumlah APIP Provinsi dengan kapabilitas APIP \geq Level 3

IKK Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 diukur dengan menghitung jumlah APIP Provinsi dengan level kapabilitas APIP \geq Level 3. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan Kapabilitas APIP Level 3.

Pada Tahun 2023, target kinerja ini adalah sebanyak 1 APIP Provinsi yang yang realisasinya masih 0%. Hal ini disebabkan berdasarkan hasil ekspose/panel atas penjaminan kualitas penilaian mandiri Kapabilitas APIP disimpulkan APIP Provinsi Sulawesi Selatan masih lemah dalam penerapan *Early Warning Sistem* (EWS) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga belum berhasil mendapatkan Kapabilitas APIP \geq Level 3.

Untuk meningkatkan kinerja peningkatan kapabilitas APIP Daerah di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:



- 1) Mengintensifkan pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi serta *coaching clinic* secara lebih tematik dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP Provinsi;
 - 2) Meningkatkan kapabilitas SDM utamanya dalam konsultasi dalam rangka peningkatan efektivitas transfer *knowledge* kepada auditor APIP Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. IKK 6.2: Jumlah APIP Kab/Kota dengan kapabilitas APIP \geq Level 3

IKK Jumlah APIP Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 diukur dengan menghitung jumlah APIP Kab/Kota yang memiliki level kapabilitas APIP \geq Level 3, dibandingkan dengan jumlah total APIP Kab/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan Kapabilitas APIP \geq Level 3. Target kinerja kumulatif pada tahun 2023 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) APIP Kab/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada Tahun 2023 baru sebanyak 15 (lima belas) APIP Kabupaten/Kota yang mencapai Level 3, atau hanya tercapai 71,43%. Hal ini disebabkan berdasarkan hasil ekspose/panel atas penjaminan kualitas penilaian mandiri Kapabilitas APIP disimpulkan sebanyak 10 APIP Kab/Kota belum mencapai Level 3. Adapun rincian APIP Kab/Kota yang telah memperoleh level 3 yaitu:

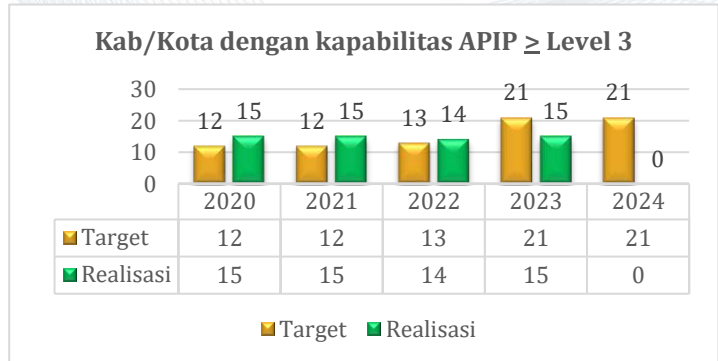
No	Pemerintah Daerah	Nilai Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP
1	APIP Kota Palopo	3,00	3
2	APIP Kabupaten Bantaeng	3,00	3
3	APIP Kabupaten Gowa	3,00	3
4	APIP Kabupaten Maros	3,00	3
5	APIP Kabupaten Sinjai	3,00	3
6	APIP Kota Parepare	3,00	3
7	APIP Kabupaten Enrekang	3,00	3
8	APIP Kabupaten Wajo	3,00	3
9	APIP Kota Makassar	3,00	3
10	APIP Kabupaten Bone	3,00	3
11	APIP Kabupaten Luwu Timur	3,00	3
12	APIP Kabupaten Pangkep	3,00	3
13	APIP Kabupaten Pinrang	3,00	3
14	APIP Kabupaten Sidrap	3,00	3
15	APIP Kabupaten Luwu Utara	3,00	3

Pada tahun 2023 terdapat 1 APIP Kabupaten yang meningkat Kapabilitasnya menjadi level 3 yakni Inspektorat Kabupaten Pangkajene Kepulauan, namun



terdapat 1 APIP yang turun kapabilitasnya menjadi level 2 yaitu Inspektorat Kabupaten Bulukumba dikarenakan masih kurangnya pemenuhan substansi penilaian dan masih belum melaksanakan audit kinerja terhadap program prioritas pemerintah daerah.

Perkembangan realisasi Jumlah APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 dan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2021-2024 disajikan pada grafik.



Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 baru mencapai 71,43% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Penyebab tidak tercapainya target Kapabilitas APIP Kab/Kota Level 3 antara lain sebagai berikut :

- 1) Kurangnya dukungan Kepala Daerah utamanya terkait belum optimalnya penyediaan anggaran pengawasan APIP dan belum efektifnya penerapan Manajemen Risiko dilingkungan OPD sehingga perencanaan pengawasan (PKPT) APIP Daerah belum sepenuhnya berbasis risiko;
- 2) Kelemahan komitmen pimpinan APIP Kab/Kota terhadap pentingnya peningkatan Kapabilitas APIP yang antara lain tercermin dari belum optimalnya penyediaan anggaran peningkatan kompetensi auditor;
- 3) Kurang optimalnya kualitas audit ketatatan, audit kinerja dan asurans GRC;
- 4) Belum menilai Sistem Pengendalian Intern termasuk menilai risiko spesifik audit dan mereviu pengendalian kunci dalam pelaksanaan audit ketaatan dan atau audit kinerja;
- 5) Masih terbatasnya informasi yang diungkapkan dalam Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP) dan ILHP tidak disampaikan tembusan ke Menteri PANRB;
- 6) Perencanaan audit ketaatan dan atau audit kinerja belum dikomunikasikan kepada *stakeholders/* auditan;
- 7) Kertas kerja audit ketaatan dan atau audit kinerja belum menungkapkan simpulan.



Untuk meningkatkan kinerja peningkatan kapabilitas APIP Daerah di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Mengintensifkan pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi serta *coaching clinic* secara lebih tematik dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP;
- 2) Meningkatkan kapabilitas SDM utamanya dalam konsultasi dalam rangka peningkatan efektivitas transfer knowledge kepada auditor APIP Daerah;
- 3) Melalui koordinasi dengan AAIP Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan forum pengawasan bagi pimpinan APIP yang didalamnya menekankan pentingnya peningkatan kapabilitas APIP.

c. IKK 6.3: Jumlah Pemprov dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Tingkat maturitas SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

IKK “Jumlah Pemerintah Provinsi dengan level Maturitas SPIP \geq Level 3” adalah dengan menghitung jumlah Pemerintah Provinsi dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah mencapai Maturitas SPIP Level 3, sehingga capaian kinerja atas Jumlah Pemprov dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 tercapai 100% dari target tahun 2023.

d. IKK 6.4: Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Tingkat maturitas SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Rumus pengukuran IKU “Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” adalah dengan menghitung jumlah Kab/Kota dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3.

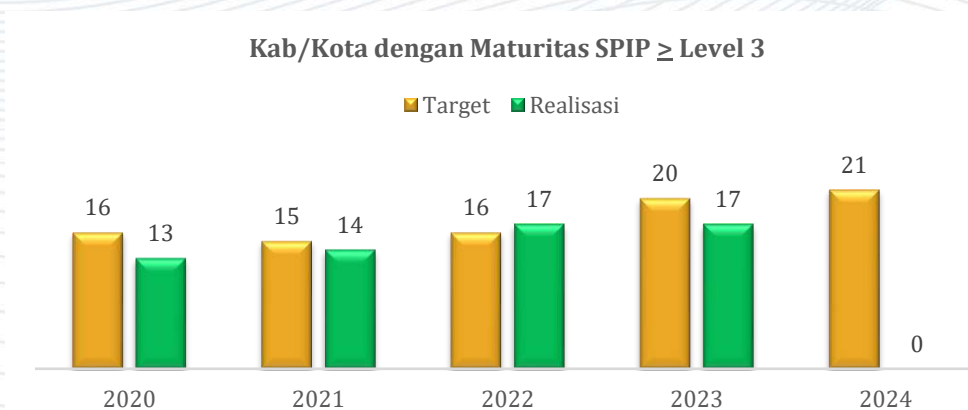
Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 baru sebanyak 17 Pemda dari 25 Pemda yang dilakukan evaluasi. Pada tahun 2023 terdapat tambahan 2 pemda yang mencapai Maturitas SPIP \geq Level 3 yakni Kabupaten Bone dan Kabupaten Pangkep. Namun, 1 pemda yang mengalami penurunan level karena tidak melakukan penilaian mandiri, sehingga tidak dapat dievaluasi oleh Tim Perwakilan yaitu Toraja Utara. Capaian level Maturitas Penyelenggaraan SPIP menggunakan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.



Rincian Kab/Kota dengan level Maturitas SPIP \geq Level 3 disajikan sebagai berikut:

No	Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP
1	Kota Palopo	3,057	3
2	Kabupaten Bantaeng	3,105	3
3	Kabupaten Bulukumba	3,136	3
4	Kabupaten Gowa	3,201	3
5	Kabupaten Luwu	3,111	3
6	Kabupaten Maros	3,420	3
7	Kabupaten Sinjai	3,217	3
8	Kabupaten Soppeng	3,042	3
9	Kabupaten Wajo	3,000	3
10	Kota Makassar	3,263	3
11	Kota Parepare	3,462	3
12	Kabupaten Bone	3,126	3
13	Kabupaten Luwu Timur	3,120	3
14	Kabupaten Pangkep	3,270	3
15	Kabupaten Pinrang	3,077	3
16	Kabupaten Sidrap	3,390	3
17	Kabupaten Luwu Utara	3,010	3

Perbandingan capaian kinerja empat tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut:



Capaian atas Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sebesar 85,00% dari target Tahun 2023 sebanyak 20 Kabupaten/Kota. Masih terdapat 7 (tujuh) pemerintah daerah yang belum mencapai maturitas SPIP level 3, yakni Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan termasuk Kabupaten Toraja Utara yang telah mengalami penurunan level maturitas SPIP. Hambatan belum tercapainya target maturitas penyelenggaraan SPIP antara lain :



- 1) Pemerintah daerah belum menetapkan SPIP sebagai Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD;
- 2) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah belum baik;
- 3) Kurangnya dukungan pimpinan pemerintah daerah terkait dengan peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memahami MR dan SPIP dan Kegiatan Manajemen Risiko belum dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Tantangan atas capaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dalam menuju Level 3 disebabkan belum terpenuhinya parameter level 3 per sub unsur (terdapat AOI pada beberapa sub unsur). Berdasarkan hasil analisis, secara umum komponen penetapan tujuan, komponen struktur dan proses, dan komponen pencapaian tujuan memiliki skor rendah pada rata-rata pemerintah daerah di bawah pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada komponen penetapan tujuan, rendahnya kualitas perencanaan pemerintah daerah secara keseluruhan yang mencakup kualitas sasaran, kualitas indikator, dan kualitas target. Hal ini disebabkan lemahnya kualitas maupun kompetensi SDM dalam hal perencanaan.

Pada komponen struktur dan proses terdapat beberapa sub unsur yang memiliki skor rendah pada rata-rata pemerintah daerah di bawah binaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, reviu atas kinerja, pemantauan berkelanjutan, dan evaluasi terpisah. Hal ini disebabkan oleh :

- 1) Pemerintah daerah belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D;
- 2) Belum adanya kebijakan yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan pengelolaan dan penilaian risiko secara terstruktur;
- 3) Pengendalian yang ada belum mempertimbangkan manajemen risiko;
- 4) Kurangnya perhatian pimpinan terhadap pengendalian yang ada;
- 5) Kurangnya pemahaman pegawai terkait manajemen risiko.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dengan melakukan bimbingan teknis, sosialisasi dan *coaching clinic*.
- 2) Peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan PPM.



e. IKK 6.5: Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3

Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3 adalah jumlah pemerintah provinsi yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq level 3. Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum mencapai MRI Level 3 sehingga capaian IKK Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3 masih 0%.

Penyebab belum tercapainya MRI Provinsi Level 3 dipengaruhi oleh:

- 1) Kebijakan Manajemen Risiko belum memuat substansi terkait risiko kemitraan dan strategi *antifraud*;
- 2) Proses Manajemen Risiko belum dilaksanakan secara utuh, di antaranya belum melekatkan pada proses bisnis, belum melakukan monitoring pelaksanaan RTP, dan keterjadian risiko;
- 3) Inspektorat belum melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko dan masih sebatas reviu atas rumusan risiko dan RTP;
- 4) Belum seluruh OPD mengidentifikasi risiko *fraud* dan risiko kemitraan dalam daftar risikonya; dan
- 5) Pemda belum mengalokasikan anggaran pelaksanaan manajemen risiko.

Upaya-upaya yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut adalah:

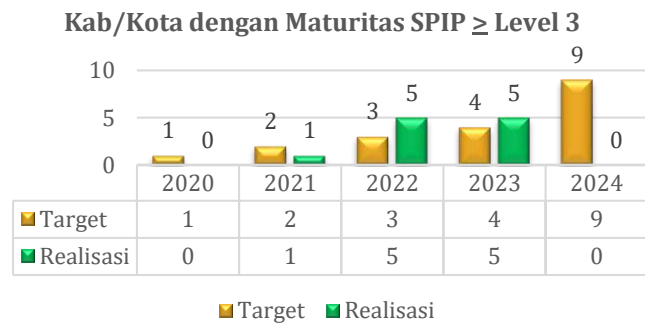
- a. Mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melengkapi kebijakan manajemen risiko dengan menambahkan substansi terkait risiko kemitraan dan strategi *antifraud* antara lain melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi.
- b. Mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengimplementasikan proses manajemen risiko pada seluruh sasaran strategis pemda, sasaran strategis OPD, dan operasional OPD mencakup identifikasi risiko (termasuk risiko kemitraan dan risiko *fraud*), analisis risiko, pelaksanaan monitoring atas realisasi RTP, dan evaluasi atas efektivitasnya.

f. IKK 6.6: Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3

Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 adalah jumlah pemda kabupaten/kota yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq level 3.



Jumlah kabupaten/kota dengan MRI \geq level 3 berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 adalah sebanyak 5 (lima) pemerintah daerah atau mencapai 125% dari target. Capaian tahun 2023 sebanyak 5 (lima)



pemerintah daerah berdasarkan hasil ekspose tim panel dan hasil Quality Assurance oleh tim pusat atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bone dan Pemerintah Kabupaten Pangkep mendapatkan nilai MRI sebesar 3,070 dan 3,050. Rendahnya capaian tahun 2023, disebabkan sebagian besar Pemda belum melakukan kegiatan pengelolaan risiko sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dengan melakukan bimbingan teknis, sosialisasi dan coaching clinic penyusunan 3 layer risk register (strategis Pemda, strategis OPD, dan operasional).
 - 2) Peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan PPM.
- g. IKK 6.7: Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

IKK “Jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah” menunjukkan persentase jumlah pemda yang akuntabel (efisien dan efektif) dalam pengelolaan keuangan dan kinerja dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.

Target kinerja ini untuk Tahun 2023 adalah sebanyak 8 (delapan) Pemda, capaian atas target kinerja ini Tahun 2023 adalah 0% karena belum ada Pemerintah Daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat ‘BB’. Pada tahun 2023, dari 25 pemda di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 23 pemda yang telah mendapatkan opini WTP dan 2 pemda yang mendapatkan opini WDP, namun belum terdapat pemda yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP BB. Rincian Opini LKPD dan nilai SAKIP pada Tahun 2023 sebagai berikut:



No	Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Predikat SAKIP	Opini LKPD
1	Provinsi Sulawesi Selatan	68,78	B	WTP
2	Kabupaten Bantaeng	63,28	B	WTP
3	Kabupaten Barru	60,04	B	WTP
4	Kabupaten Bone	68,20	B	WTP
5	Kabupaten Bulukumba	62,45	B	WTP
6	Kabupaten Enrekang	57,91	CC	WTP
7	Kabupaten Gowa	68,55	B	WTP
8	Kabupaten Jeneponto	64,95	B	WDP
9	Kabupaten Kepulauan Selayar	61,02	B	WTP
10	Kabupaten Luwu	61,81	B	WTP
11	Kabupaten Luwu Timur	66,51	B	WTP
12	Kabupaten Luwu Utara	66,77	B	WTP
13	Kabupaten Maros	64,08	B	WTP
14	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	63,53	B	WTP
15	Kabupaten Pinrang	64,93	B	WTP
16	Kabupaten Sidenreng Rappang	64,25	B	WTP
17	Kabupaten Sinjai	69,28	B	WTP
18	Kabupaten Soppeng	64,44	B	WTP
19	Kabupaten Takalar	63,37	B	WTP
20	Kabupaten Tana Toraja	55,95	CC	WDP
21	Kabupaten Toraja Utara	60,36	B	WTP
22	Kabupaten Wajo	62,99	B	WTP
23	Kota Makassar	69,64	B	WTP
24	Kota Palopo	64,35	B	WTP
25	Kota Parepare	62,54	B	WTP

Upaya-upaya yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah:

- 1) Melakukan monitoring progres tindak lanjut atas pelaksanaan rencana aksi dalam rangka peningkatan kualitas opini LKPD yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberikan masukan, arahan, dan bimbingan berdasarkan hasil monitoring Inspektorat.
- 2) Mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas SAKIP antara lain melalui perbaikan perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai



proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat.

h. IKK 6.8: Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel

Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel adalah jumlah desa yang telah taat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai ketentuan.

Desa telah menjadi ujung tombak pembangunan nasional. Oleh karena itu, keuangan desa diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan secara efisien dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Pada tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Akuntabilitas Keuangan Desa yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil evaluasi jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel adalah sebanyak 25 desa atau mencapai 100% dari target sebanyak 25 desa.

i. IKK 6.9: Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai

Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai adalah jumlah desa yang telah taat dalam mengelola aset desa sesuai ketentuan.

Pengelolaan aset desa diatur pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pengelolaan aset desa merupakan serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

Pada Tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan bimtek tata kelola aset desa yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan akuntabilitas keuangan desa melalui penguatan tata kelola aset desa.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi jumlah desa yang pengelolaan aset desanya memadai adalah sebanyak 25 desa atau mencapai 100% dari target sebanyak 25 desa.

j. IKK 6.10: Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3

Badan usaha dengan MRI baik tercapai apabila aktivitas manajemen organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan



pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan MRI pada BUMD.

Realisasi capaian jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 2 dari target sebanyak 2 BUMD atau 100%. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) BUMD Jasa Air tahun 2023, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama BUMD	Level
1	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo	3
2	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare	3
3	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar	1

Perkembangan realisasi jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3 dan perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada grafik.



Dari gambar di atas, jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3 telah mencapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2024, jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3 baru mencapai 66,67%.

k. **IKK 6.11: Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3**

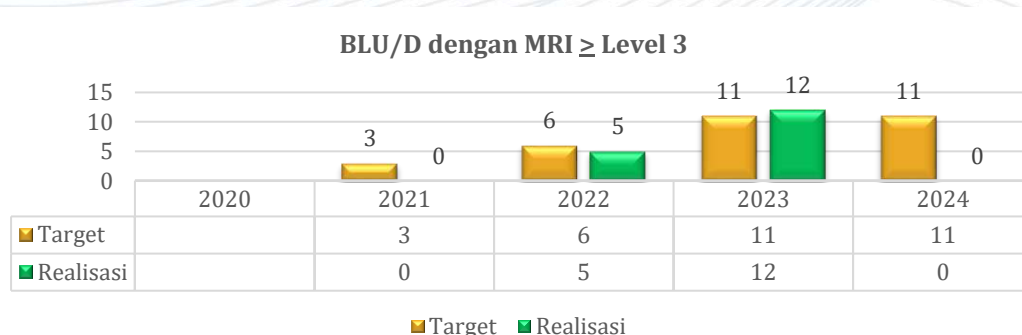
Badan usaha dengan MRI baik tercapai apabila aktivitas manajemen organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan MRI pada BLU/D.



Realisasi capaian target jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 12 BLU/D atau 109,09% dari target sebanyak 11 BLU/D, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama BLU/D	Level
1	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo	4
2	RSUP dr. Tadjuddin Chalid	3
3	RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan	3
4	RSUD Andi Makkasau Parepare	3
5	RSUD Haji Kota Makassar	3
6	RSUD Kab. Sinjai	3
7	RSUD Batara Siang Kab. Pangkajene Kepulauan	3
8	RSUD Nene Mallomo Kab. Sidenreng Rappang	3
9	RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng	3
10	RSUD Kota Makassar	3
11	RSUD Dr. La Palaloi Maros	3
12	RSUD Lasinrang Pinrang	3

Perkembangan realisasi jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3 dan perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada grafik.



Dari gambar di atas, jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3 telah mencapai 109,09%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2024, jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 telah mencapai 109,09%.

I. IKK 6.12: Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

IKK jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 digunakan untuk mengukur sejauh mana peran pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan kapabilitas Satuan Pengawasan Intern pada BUMD.

Realisasi capaian target jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3



sebanyak 2 (dua) BUMD atau 100% dari target 2 BUMD. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) BUMD Jasa Air tahun 2023, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama BUMD	Level
1	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo	3
2	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare	2
3	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar	3

Perkembangan realisasi jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 dan perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada grafik.



Dari gambar tersebut, jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 telah mencapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2024, jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 telah mencapai 66,67%.

m. IKK 6.13: Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

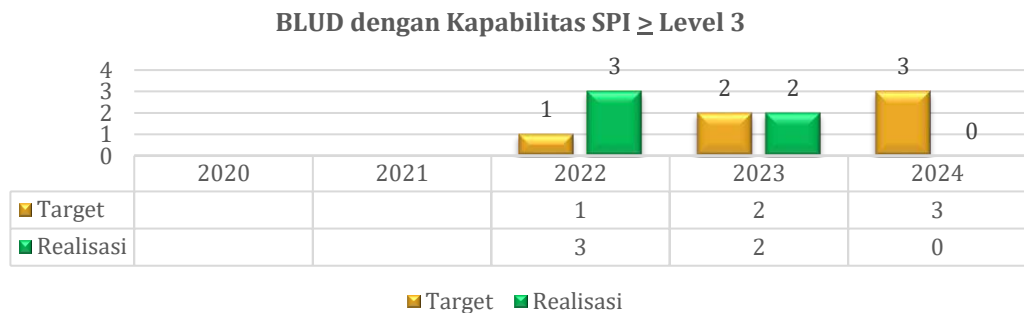
IKK jumlah BLUD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 digunakan untuk mengukur sejauh mana peran pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan kapabilitas Satuan Pengawasan Intern pada BLUD.

Realisasi capaian target jumlah BLUD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 sebanyak 2 (dua) atau 100% dari target 2 (dua) BLUD. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) BLUD tahun 2023, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama BLUD	Level
1	RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan	1
2	RSUD Haji Kota Makassar	3
3	RSUD Andi Makkasau Kota Parepare	3

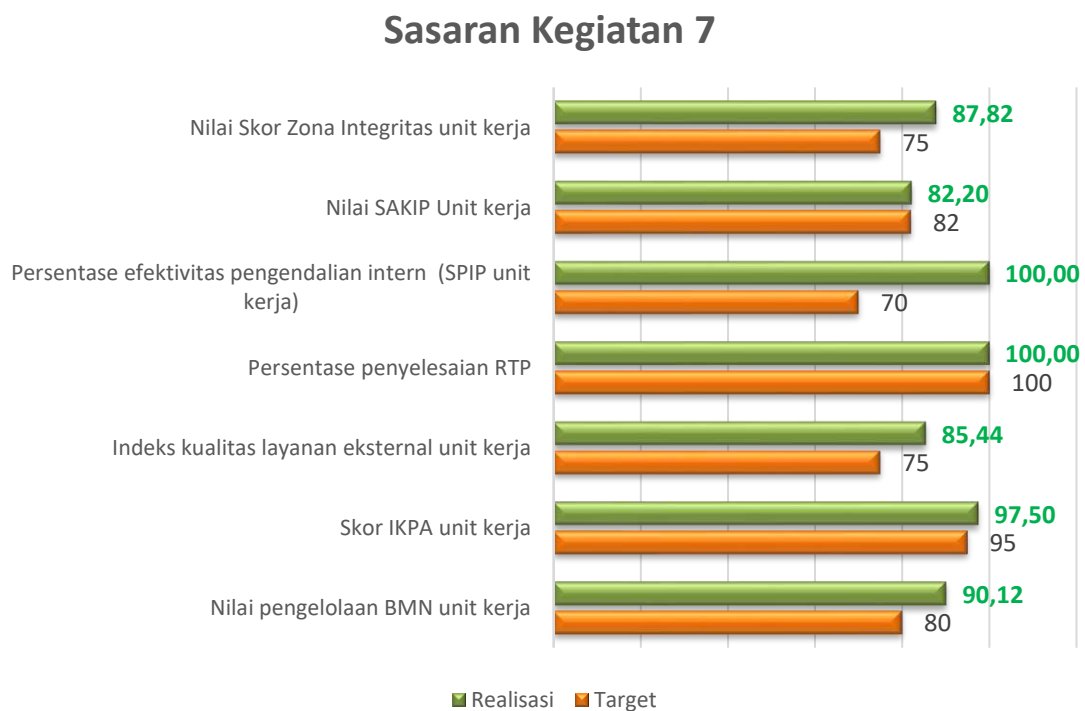


Perkembangan realisasi jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 dan perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada grafik.



Dari gambar di atas, jumlah BLUD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 telah mencapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2024, jumlah BLUD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 baru mencapai 66,67%.

7. Sasaran kegiatan 7: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja



a. IKK 7.1: Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

IKK nilai skor zona integritas unit kerja diukur dengan hasil penilaian mandiri skor zona integritas, sesuai dengan kertas kerja penilaian mandiri pembangunan zona integritas yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 10 Tahun 2019. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana

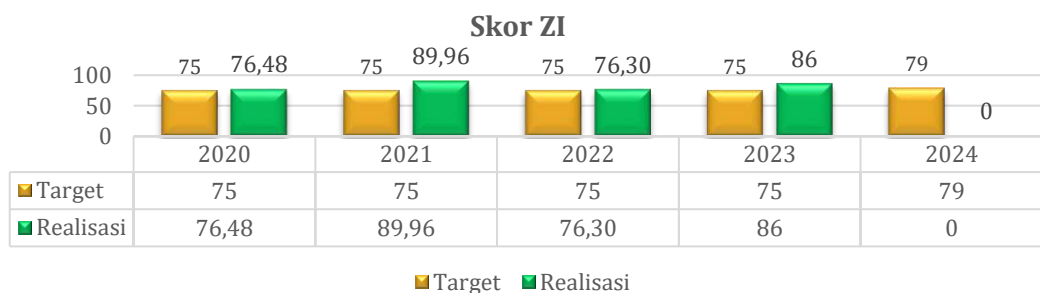


peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.



Pada Tahun 2023, nilai skor zona integritas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah 87,82 atau mencapai 117,09% dari target 2023. Nilai Skor Zona Integritas didapatkan dari total nilai komponen pengungkit dan

komponen hasil penilaian mandiri zona integritas. Perkembangan realisasi nilai skor zona integritas unit kerja dan perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target 2020-2024 disajikan dalam grafik.

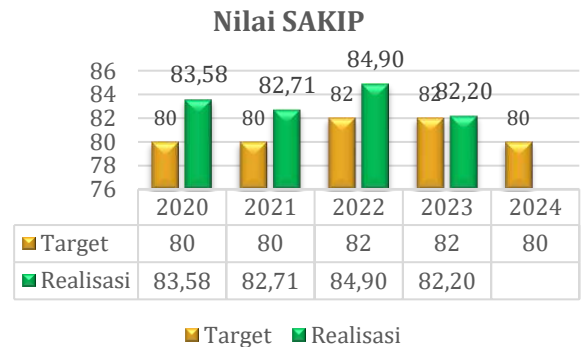


b. IKK 7.2: Nilai SAKIP Unit Kerja

IKU nilai SAKIP unit kerja diukur dengan menghitung Nilai SAKIP unit kerja sesuai hasil evaluasi dari Inspektorat, atau minimal hasil penilaian mandiri unit kerja. Indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah.



Pada tahun 2023, nilai SAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah 82,20 atau mencapai 100,24% dari target tahun 2023. Nilai SAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi merupakan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat BPKP. Perkembangan realisasi nilai skor SAKIP unit kerja dan perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target 2020-2024 disajikan dalam grafik.



c. IKK 7.3: Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)

IKU Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja) diukur dengan menghitung (jumlah pengendalian *existing* yang efektif ditambah jumlah RTP yang selesai dan efektif) dibagi (jumlah seluruh pengendalian *existing* ditambah jumlah RTP yang telah selesai) dikali 100%.

Pada tahun 2023, persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan) adalah 100% atau mencapai 142,86% dari target 2023 sebesar 70%. Di perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 56 pernyataan risiko, 5 risiko berada diatas selera risiko dan seluruhnya telah dibuat serta diselesaikan RTP-nya.

d. IKK 7.4: Persentase Penyelesaian RTP (MRI unit kerja)

IKU persentase penyelesaian RTP (MR Unit Kerja) diukur dengan menghitung jumlah RTP yang diselesaikan dibagi jumlah RTP dikalikan dengan 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase penyelesaian RTP yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah 100%.

Pada tahun 2023, persentase penyelesaian RTP (MR Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan) adalah 100% atau mencapai 100% dari target tahun 2023. Di perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 56 pernyataan risiko, 5 risiko berada diatas selera risiko dan seluruhnya telah dibuat serta diselesaikan RTP-nya.

e. IKK 7.5: Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja

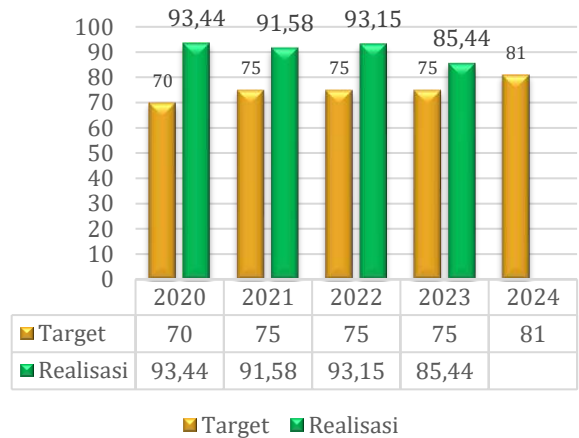
IKK “indeks kepuasan layanan unit kerja” diukur dari rata-rata hasil penilaian tiap variable dalam survey reputasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi



Selatan. Indikator ini digunakan untuk menilai reputasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan oleh para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2023, indeks kualitas layanan unit kerja adalah 85,44 atau mencapai 113,92% dari target 2023. Indeks kepuasan layanan unit kerja diukur melalui survei layanan perwakilan oleh 142 (seratus empat puluh dua) responden yang merupakan stakeholders Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Perkembangan realisasi indeks kualitas layanan eksternal Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 dengan target renstra tahun 2020 – 2024 disajikan pada grafik diatas.

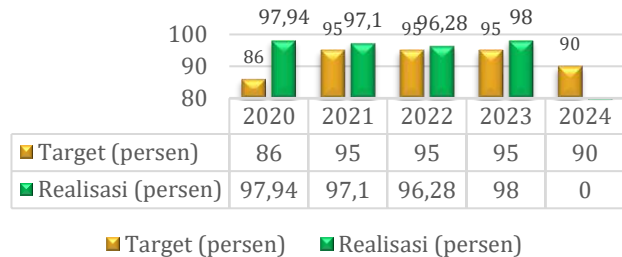
Indeks Kualitas Layanan Eksternal



f. IKK 7.6: Skor IKPA Unit Kerja

IKU “Skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA Unit Kerja” diukur dari hasil penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kelancaran pelaksanaan anggaran, dukungan manajemen kas dan laporan keuangan. Target Skor IKPA unit kerja di tahun 2023 adalah 95. Sedangkan capaian skor IKPA Unit Kerja Tahun 2023 adalah 97,50 atau mencapai 102,63% dari target. Skor tersebut didapatkan dari hasil penilaian Kementerian Keuangan yang ditampilkan dalam aplikasi OM-SPAN. Perkembangan realisasi skor IKPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 dengan target tahun 2020 – 2024 disajikan pada grafik.

Skor IKPA



g. IKK 7.7: Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

IKU nilai Pengelolaan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan menggunakan form penilaian pengelolaan BMN dimana penilaian dilakukan secara self assessment dan divalidasi oleh Biro Umum. Indikator ini



digunakan untuk memacu meningkatkan pengelolaan BMN menjadi lebih baik. Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah memperoleh predikat baik untuk pengelolaan BMN.



Pada Tahun 2023, berdasarkan hasil self assessment yang telah divalidasi oleh Biro Umum BPKP, nilai pengelolaan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh skor 90,12 dan memperoleh predikat memuaskan atau 112,65% dari target sebesar 80.

B. KINERJA LAINNYA TAHUN 2023

1. Kinerja Lain

a. APP dan Non APP

Di samping kegiatan pengawasan yang diarahkan untuk mencapai target kinerja, selama tahun 2023 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai arahan BPKP Pusat baik yang termasuk dalam Agenda Prioritas Pengawasan (APP) maupun Non APP.

Kegiatan pengawasan yang telah dilakukan antara lain Penanganan *Covid-19*, Pemulihan Ekonomi Nasional, Akuntabilitas Keuangan Daerah, Pengawasan pada Bidang Pendidikan, Pengawasan pada Bidang Kesehatan, Pengawasan atas Penanganan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Pembangunan Infrastruktur.

1) Penanganan *Covid-19*

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terkait penanganan *Covid-19*, antara lain:



- a) Monitoring Pelaksanaan Stock Opname Vaksin Covid-19 Per 31 Desember 2022 Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b) Kompilasi Hasil Monitoring Atas Pelaksanaan Stock Opname Persediaan Vaksin Covid-19 Per 31 Desember 2022 Se-Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c) Audit Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja Untuk Periode Sampai Dengan 28 Februari 2023;
 - d) Pemantauan Atas Distribusi Dan Pemanfaatan Almatkes Covid-19 Dalam Rangka Peningkatan Kedisiplinan Protokol Kesehatan TA 2021 Pada Kabupaten Luwu.
- 2) Akuntabilitas Kinerja Daerah
- Kegiatan pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terkait akuntabilitas kinerja daerah berupa:
- a) Evaluasi atas Efektivitas Penggunaan Transfer ke Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bone, Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b) Monitoring atas Efektivitas Penggunaan Transfer ke Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c) Bimbingan Teknis Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2023;
 - d) Bimbingan Teknis Aplikasi Siskeudes Versi 2,05 dan Siswaskeudes di Kantor BPKP Pusat;
 - e) Bimbingan Teknis Penyusunan SBU, ASB, dan HSPK Kabupaten Barru;
 - f) Bimbingan Teknis Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023;
 - g) Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Bone, Pemerintah Kabupaten Luwu
 - h) Bimbingan Teknis Tata Kelola Aset Desa Triwulan IV Tahun 2023 pada Kabupaten Bone;
 - i) Bimbingan Teknis Aplikasi Siswaskeudes pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Inspektorat Kabupaten Sidenreng dan Rappang.
- 3) Pengawasan pada Bidang Pendidikan



Kegiatan pengawasan bidang pendidikan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan antara lain sebagai berikut:

- a) Evaluasi Atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Pada Kota Parepare Tahun 2022-2023;
 - b) Evaluasi Atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Pada Kota Makassar Tahun 2022-2023;
 - c) Evaluasi Atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2022-2023 Pada Kota Makassar;
 - d) Evaluasi Atas Peningkatan Sarana, Prasarana, Dan Resiliensi Pendidikan Madrasah Tahun 2023 Pada Kabupaten Bulukumba;
 - e) Evaluasi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Madrasah Pada Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023;
 - f) Evaluasi Atas Peningkatan Sarana Prasarana Dan Resiliensi Pendidikan Tahun 2023 Pada Kabupaten Maros;
 - g) Evaluasi Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Resiliensi Pendidikan Tahun 2023 Pada Jenjang Pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 4) Pengawasan pada Bidang Kesehatan
- Kegiatan Pengawasan bidang kesehatan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan antara lain sebagai berikut:
- a) Monitoring Pelaksanaan Stock Opname Vaksin Covid-19 Per 31 Desember 2022 Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b) Kompilasi Hasil Monitoring Atas Pelaksanaan Stock Opname Persediaan Vaksin Covid-19 Per 31 Desember 2022 Se-Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c) Audit Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseases* 2019 (*Covid-19*) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja Untuk Periode Sampai Dengan 28 Februari 2023;
 - d) Pemantauan Atas Distribusi Dan Pemanfaatan Almatkes Covid-19 Dalam Rangka Peningkatan Kedisiplinan Protokol Kesehatan Ta 2021 Pada Kabupaten Luwu;
 - e) Audit Tujuan Tertentu Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) Di Provinsi Sulawesi Selatan;



- f) Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kabupaten Takalar;
 - g) Evaluasi Reformasi Sistem Kesehatan Layanan Primer, Layanan Rujukan, Penguatan Inovasi Dan Teknologi Kesehatan, Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan Serta Pengadaan Alat Antropometri dan USG Di Kab. Sinjai Tahun 2023.
- 5) Pengawasan atas Penanganan Jaring Pengaman Sosial (JPS)
Kegiatan pengawasan bidang kesehatan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:
- a) Reviu atas Kebijakan dan Aransemen Kelembagaan Bauran Program Kesejahteraan Sosial Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b) Reviu atas Kebijakan dan Aransemen Kelembagaan Bauran Program Kesejahteraan Sosial Pada Kabupaten Barru;
 - c) Reviu atas Kebijakan dan Aransemen Kelembagaan Bauran Program Kesejahteraan Sosial Pada Kabupaten Jeneponto;
 - d) Evaluasi Atas Implementasi Bauran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial Serta Pemberdayaan Sosial Pada Kota Makassar;
 - e) Evaluasi Atas Bantuan Stimulan Kepada Petani Gagal Panen (PUSO) Akibat Banjir Menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) Pada Kab. Pinrang;
 - f) Evaluasi Atas Bantuan Stimulan Kepada Petani Gagal Panen (PUSO) Akibat Banjir Menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) Pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - g) Evaluasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 Pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - h) Evaluasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 Pada Kabupaten Takalar.
- 6) Pengawasan pada Bidang Pembangunan Infrastruktur
Kegiatan pengawasan pada bidang pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan antara lain sebagai berikut:
- a) Evaluasi atas Pembangunan Infrastruktur Destinasi Wisata pada Desa Wisata Tahun 2023 pada Kabupaten Sidenreng Rappang;



- b) Evaluasi atas Pembangunan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN) pada Desa Wisata Tahun 2023 Kabupaten Soppeng.

b. Penyelenggaraan Diklat

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai Kantor Pengelola Diklat sejak tahun 2014 bertugas untuk menyelenggarakan diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan diklat teknis substansi bertempat di gedung diklat kantor pengelola diklat BPKP Sulawesi Selatan.

Diklat yang diadakan sesuai dengan kalender diklat yang ditetapkan oleh Pusdiklatwas BPKP dan diklat mandiri permintaan pemerintah daerah dan instansi vertikal.



1) Dasar Penyelenggaraan

Dasar penyelenggaraan Diklat Pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a) Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-637/K/SU/2013 tanggal 30 Agustus 2013 Tentang Kantor Pengelola Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP di Makassar.
- b) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Diklat Kantor Pengelola Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan di Makassar Nomor BAST-188/PW21/1/2014.

2) Tenaga Pengajar dan Panitia Diklat

Tenaga Pengajar sebagian berasal dari Pejabat Struktural/Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh panitia diklat adalah pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.



3) Realisasi Diklat Tahun 2023

Realisasi penyelenggaraan diklat selama tahun 2023 pada Kantor Pengelola diklat BPKP Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Diklat	Jumlah Kelas
1	Diklat Jabatan Fungsional Auditor	5
2	Diklat Teknis Substantif	12
3	Diklat Mandiri Teknis Substantif	7
Total		24

2. Penghargaan/Apresiasi Instansi Lain

Penghargaan yang diterima Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 adalah:

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun	Uraian Ringkas Penghargaan
1.	WBK	Menpan RB	2023	Unit kerja telah meraih predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi
2.	-	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	2023	Mitra Strategis Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

3. Perbaikan SAKIP Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai 82,20 dengan predikat memuaskan (A). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi, upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 antara lain:

- 1) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang melibatkan seluruh pegawai dan telah menghasilkan penghargaan predikat Wilayah Bebas Korupsi;
- 2) Meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui usulan Diklat maupun PPM terkait implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021.
- 3) Menyusun Rencana Aksi atas Kinerja tahun 2023.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 sebesar Rp37.450.531.426,00 atau 99,38% dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp37.683.731.000,00. Rincian per jenis belanja dan per sasaran kegiatan dapat dilihat pada:



1. Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 menurut Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	25.900.785.000	25.879.684.616	99,92
2	Belanja Barang	10.409.806.000	10.202.167.731	98,01
3	Belanja Modal	1.373.140.000	1.368.679.079	99,68
Jumlah		37.683.731.000	37.450.531.426	99,38

2. Anggaran dan realisasi keuangan tahun 2023 menurut sasaran kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengawasan Pembangunan [Penambahan Target - Penambahan Anggaran]	1.172.200.000	1.160.556.820	99,01
2	Pengawasan Pembangunan [Base Line]	4.416.143.000	4.320.863.656	97,84
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.373.140.000	1.368.679.079	99,68
4	Layanan Dukungan Manajemen internal	30.722.248.000	30.600.431.871	99,60
Jumlah Total		37.683.731.000	37.450.531.426	99,38



BAB IV PENUTUP

Sesuai mandat yang diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam rangka pelaksanaan amanah tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) BPKP 2020 – 2024 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

A. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dengan menggunakan sistem aplikasi antara lain aplikasi DMS, SIMA, dan E-SAKIP. Sedangkan format disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan membandingkan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan realisasi selama Tahun 2023 dengan menggunakan rumus yang sesuai dengan masing-masing indikator kinerja yang mendukung program yang dilaksanakan selama Tahun 2023.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator sasaran program sebanyak 7 buah dengan sasaran kegiatan sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah, dengan hasil 30 indikator kinerja (83,33%) telah mencapai target dan enam indikator kinerja (16,67%) belum mencapai target indikator dengan kategori kinerja “Belum Mencapai Target”.



Indikator Kinerja dengan kategori “Mencapai/Melampaui Target” adalah:

1. Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi yaitu senilai Rp Rp3.109.640.169,90,00 dari target senilai Rp2.021.000.000,00, sehingga capaiannya 153,87%.
2. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah yaitu senilai Rp690.663.808.749,00 dari target senilai Rp137.919.000.000,00, sehingga capaiannya 500,77%.
3. Nilai penyelamatan keuangan Negara dan daerah yaitu senilai Rp146.509.953.440,85 dari target Rp113.184.000.000,00, sehingga capaiannya sebesar 129,44%.
4. Jumlah proyek strategis nasional yang tercapai sesuai target yaitu sebanyak 1 proyek dari target 1 proyek strategis nasional, sehingga capaiannya sebesar 100,00%.
5. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan adalah 100% dari target 85%, sehingga capaiannya sebesar 117,65%.
6. Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi sebanyak dua topik dari target dua topik APPD, sehingga capaiannya sebesar 100,00%.
7. Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti sebanyak 86,36% dari target 80% sehingga capaiannya sebesar 107,95%.
8. Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik adalah 2 BUMD dari target 2 BUMD, sehingga capaiannya 100,00%.
9. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat yaitu sebanyak 12 (dua belas) BUMD dari target 11 BUMD, sehingga capaiannya sebesar 109,09%.
10. Jumlah BLUD dengan kinerja sehat yaitu sebanyak 4 BLUD dari target 4 BLUD, sehingga capaiannya sebesar 100,00%.
11. Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan sebanyak 71 BUMDes dari target 69 BUMDes, sehingga capaiannya sebesar 102,90%.
12. Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa sebanyak 9 BUMDes dari target 5 BUMDes, sehingga capaiannya sebesar 180,00%.
13. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sebanyak 55 penugasan dari total 55 penugasan represif atau mencapai 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100,00%.
14. Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi dari 6 penugasan atau mencapai 100% dari target sebesar 85%, sehingga capaiannya sebesar 117,65%.



15. Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik sebanyak 2 Badan Usaha dari target 2 Badan Usaha sehingga capaiannya sebesar 100,00%.
16. Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sebanyak 1 Provinsi dari target 1 Provinsi, sehingga capaiannya sebesar 100,00%.
17. Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 5 Kab/Kota dari target 4 Kab/Kota sehingga capaiannya sebesar 125,00%.
18. Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel sebanyak 25 Desa dari target 25 Desa, sehingga capaiannya sebesar 100,00%
19. Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai sebanyak 25 Desa dari target 25 Desa, sehingga capaiannya sebesar 100,00%.
20. Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 2 BUMD dari target 2 BUMD sehingga capaiannya sebesar 100,00%.
21. Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 10 BLUD dan 2 BLU sehingga total 12 BLU/D dari target 8 BLU/D, sehingga capaiannya sebesar 150,00%.
22. Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 sebanyak 2 BUMD dari target 2 BUMD sehingga capaiannya sebesar 100,00%.
23. Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 sebanyak 2 BUMD dari target 2 BUMD sehingga capaiannya sebesar 100,00%.
24. Nilai skor zona integritas unit kerja yaitu 87,82 dari skor skala 100 dari target 75, sehingga capaiannya sebesar 117,09%.
25. Nilai SAKIP unit kerja yaitu 82,20 skor skala 100 dari target 82 skor skala 100, sehingga capaiannya sebesar 100,24%.
26. Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) pada tahun 2023 adalah 100,00% atau mencapai 142,86% dari target sebesar 70%.
27. Persentase Penyelesaian RTP (MR Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan) terdapat 56 pernyataan risiko dan telah diselesaikan RTPnya sebanyak 56 atau 100% dari target 100% pada tahun 2023.
28. Indeks kepuasan layanan unit kerja (khusus unit kerja perwakilan) adalah 85,44 indeks skala 100 dari target 75 indeks skala 100, sehingga capaiannya sebesar 113,92%.
29. Skor IKPA unit kerja (khusus unit kerja mandiri) yaitu 97,50 skor skala 100 dari target 95% skor skala 100, sehingga capaiannya sebesar 102,63%.
30. Nilai pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus unit kerja mandiri) yaitu 90,12% dari target 80%, sehingga capaiannya 112,65%.



Indikator kinerja dengan kategori “Belum mencapai target” adalah:

1. Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik yaitu 0 Pemda dari target 9 Pemda, sehingga capaiannya 0,00%.
2. Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 yaitu 0 APIP dari target 1 APIP Provinsi, sehingga capainnya 0,00%.
3. Jumlah APIP Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 yaitu 15 APIP dari target 21 APIP, sehingga capaiannya 71,43%
4. Jumlah APIP Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 yaitu 17 APIP dari target 21 APIP Provinsi, sehingga capaiannya 85,00%
5. Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3 yaitu 0 Pemda dari target 1 Provinsi, sehingga capaiannya 0,00%.
6. Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yaitu 0 Pemda dari target 8 Pemda, sehingga capaiannya 0,00%.

B. UPAYA DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran program tersebut di atas belum merupakan capaian optimal dan memerlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang dengan meningkatkan efektivitas kegiatan *assurance* dan *consulting*. Selain itu perlu juga diambil langkah-langkah perbaikan kegiatan pengawasan yang disesuaikan dengan mandat terbaru sehingga dapat menjawab tantangan yang dibebankan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun langkah konkrit yang dilakukan adalah:

1. Peningkatan opini BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan peningkatan predikat SAKIP Pemda dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Peningkatan kapasitas SDM pada Pemerintah Daerah khususnya terkait perbaikan kualitas SAKIP antara lain melalui perbaikan perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat
 - c. Pembenahan sistem dan tata kelola, sistem akuntansi dan manajemen asset.
 - d. Kegiatan audit, evaluasi, dan reviu diarahkan kepada kesesuaian penyelenggaraan *risk management, control, dan governance process* dengan



- kualitas yang digariskan dengan kebijakan manajemen, standar, atau norma yang diberlakukan untuk praktik yang sehat.
2. Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good public governance*) dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan Capaian Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - b. Mendorong seluruh BUMN/D dan BLUD yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerapkan kriteria GCG dengan pembinaan pada BUMN/BUMD serta BLUD melalui kegiatan evaluasi/ pengembangan sistem pengelolaan dan bimtek/konsultasi/sosialisasi/asistensi/pendampingan penerapan GCG.
 3. Mewujudkan iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Pre-emptif dan Preventif pada implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta implementasi sistem pencegahan KKN (*Fraud Control Plan*) di semua OPD di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Peningkatan komunikasi/ koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait dengan permintaan audit investigasi maupun PKKN.
 - c. Melakukan sosialisasi tentang produk-produk Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dimanfaatkan *stakeholders* sesuai dengan mandat yang ada, diantaranya Evaluasi kinerja PDAM/PERUMDAM, audit atas eskalasi harga dan atau klaim, bimtek dan atau evaluasi FCP, bimtek dan atau asesmen GCG, implementasi SIA dan asesmen MR BLUD.
 4. Peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah yang profesional dan kompeten utamanya kepada APIP Daerah yang belum mencapai kapabilitas level 3, melalui:
 - a. Kegiatan sosialisasi dan internalisasi ketentuan terbaru JFA dan tata kelola APIP
 - b. Bimbingan teknis dan atau *coaching clinic* penyusunan PPBR, evaluasi/update risk register, penyusunan PKA, kertas kerja dan laporan hasil audit ketaatan dan audit kinerja.
 5. Peningkatan maturitas SPIP utamanya kepada Pemerintah Daerah yang belum mencapai maturitas SPIP level 3 melalui bimbingan teknis dan atau *coaching clinic* penerapan SPIP.



6. Peningkatan kompetensi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melalui PPM, *workshop* dan diklat.

Sebagai akhir kata, kiranya Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam menilai kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran BPKP di daerah untuk memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya *good governance* dan *clean government*.



LAMPIRAN



**KINERJA OUTCOME TAHUN 2023
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN**

No	Sastra/ Saspro/ Saskeg	IKU/KP/IKK	Kinerja Tahun 2023				Keuangan Tahun 2023 (Rp)			SDM Tahun 2023 (OH)		
			Satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Rp (Juta)	2.021	3.109,64	153,87						
		Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rp (Juta)	137.919	690.663,80	500,77						
		Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rp (Juta)	113.184	146.509,95	129,44						
Capaian rata-rata						261,36	716.943.000,00	705.525.769,00	98,41	861	797	92,57
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1	1	100,00						
		Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85	100	117,65						
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	2	100,00						
Capaian rata-rata						105,88	1.172.200.000,00	1.160.556.820,00	99,01	810	756	93,33
3	Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi Tanggung Jawab Perwakilan	Persentasi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80	86,36	107,95						
Capaian rata-rata						107,95	157.680.000,00	156.472.311,00	99,23	304	275	90,46
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	2	2	100,00						
		Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat	BUMD	11	12	109,09						
		Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat	BLUD	4	4	100,00						
		Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan	BUMdes	69	71	102,90						
		Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMdes	5	9	180,00						
Capaian rata-rata						118,40	291.150.000,00	285.268.596,00	97,98	748	687	91,84
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00						
		Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	85	100	117,65						
		Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	6	0	-						
		Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Badan Usaha	2	2	100,00						
Capaian rata-rata						79,41	236.972.000,00	235.898.000,00	99,55	560	518	92,50



No	Sastra/ Saspro/ Saskeg	IKU/IKP/IKK	Kinerja Tahun 2023				Keuangan Tahun 2023 (Rp)			SDM Tahun 2023 (OH)		
			Satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	Jumlah APIP Provins dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Provinsi	1	0	-						
		Jumlah APIP Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Kab/Kota	21	15	71,43						
		Jumlah Pemprov dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Provinsi	1	1	100,00						
		Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Kab/Kota	20	17	85,00						
		Jumlah Provins dengan MRI ≥ Level 3	Provinsi	1	0	100,00						
		Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Kab/Kota	4	5	125,00						
		Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	8	0	-						
		Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Deaa	25	25	100,00						
		Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Deaa	25	25	100,00						
		Jumlah BUMN dengan MRI ≥ Level 3	BUMN	2	2	100,00						
		Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3	BLUD	11	12	109,09						
		Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI > Level 3	BUMD	2	2	100,00						
Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI > Level 3	BLU/D	2	2	100,00								
Capaian rata-rata						83,89	3.013.398.000,00	2.927.458.532,00	97,15	3.714	3.457	93,08
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	87,82	117,09						
		Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	82,2	100,24						
		Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	100	142,86						
		Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	Persen	100	100	100,00						
		Indeks Kualias Layanan Eksenal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	85,44	113,92						
		Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	95	97,5	102,63						
		Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Kategori	80	90,12	112,65						
		Capaian rata-rata						112,77	32.095.388.000,00	31.979.351.398,00	99,64	2.154



**PERBANDINGAN REALISASI *OUTCOME* 2023 DENGAN 2020, 2021 dan 2022
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Sasaran Strategis (Sastra)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan										Target 2024	% realisasi dari tahun 2024	
		Satuan	2023		2022		2021		2020					
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)				
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Rp (Juta)	3.109,64	153,87	5.058,62	227,76	28.533,00	1.008,59	440,00	92,83	2.021	153,87
		1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rp (Juta)	690.663,80	500,77	783.519,08	103,04	94.299,00	48,19	48.091,00	4,282	112.900	611,75
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rp (Juta)	146.509,95	129,44	59.890,87	4.606,99	50.244,00	149,20	13.234,00	48,79	51.982	281,85
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1	100,00	2	200,00	1	100,00	9	900,00	1	100,00
		2.2	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	100	117,65	100	117,65	0	0	0	0	85	117,65
		2.3	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	100,00	2	100,00	0	0	0	0	0	0,00
3	Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi Tanggung Jawab Perwakilan	3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	86,36	107,95	73,17	91,46	0	0	0	0	0	0,00
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4.2	Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat	BUMD	12	109,09	12	120,00	9	100,00	12	133,34	11	109,09
		4.3	Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat	BLUD	4	100,00	4	100,00	1	50,00	0	0	4	100,00
		4.4	Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan	BUMdes	71	102,90	55	100,00	32	128,00	0	0	77	92,21
		4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMdes	9	180,00	5	250,00	0	0	0	0	0	0,00
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00
		5.2	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100	117,65	100	125,00	100	133,33	100	142,80	90	111,11
		5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Badan Usaha	2	100,00	3	300,00	0	0	0	0	0	0,00



Sasaran Strategis (Sastra)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	IKU Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan								Target 2024	% realisasi dari tahun 2024		
			2023		2022		2021		2020					
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)				
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	6.1	Jumlah APIP PProvinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00
		6.2	Jumlah APIP Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	15	71,43	14	107,69	15	125,00	15	125,00	21	71,43
		6.3	Jumlah Pemprov dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Provinsi	1	100,00	1	100,00	1	100,00	0	0	1	100,00
		6.4	Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	17	85,00	17	106,25	14	93,33	19	118,75	21	80,95
		6.5	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Provinsi	0	100	1	0	0	0	0	0	9	0,00
		6.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	5	125,00	1	50,00	1	0,00	0	0	9	55,56
		6.7	Jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00
		6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Deaa	25	100,00	80	400,00	0	0	0	0	1240	2,02
		6.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Deaa	25	100,00	12	100,00	12	100,00	0	0	506	4,94
		6.10	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	2	100	0	0	0	0	0	0	11	18,18
		6.11	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	12	109,09	5	83,33	0	0	0	0	11	109,09
		6.12	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI > Level 3	BUMD	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		6.13	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI > Level 3	BLU/D	2	100,00	3	300,00	0	0	0	0	0	0,00
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	86	114,67	76,3	101,73	89,96	119,95	76,48	101,07	79	108,86
		7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,2	100,24	84,9	103,54	82,71	103,39	83,58	104,48	84	97,86
		7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	100	142,86	95,89	136,99	100,00	153,85	0	0	0	0,00
		7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	Persen	100	100,00	100	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0,00
		7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksenal Unit Kerja	Indeks Skala 100	85,44	113,92	93,15	124,20	91,58	122,11	78,65	112,36	81	105,48
		7.6	Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	97,5	102,63	96,28	101,35	97,10	102,21	97,94	113,89	90	108,33
		7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Kategori	90,12	112,65	97,02	121,28	88,00	110,00	0	0	100	90,12



LAMPIRAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2023
 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sasaran Strategis (Sastra)	Rerata Capaian Sastra	Rincian Output (RO)	Kinerja RO				Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
			Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisiensi (7≥10)	Belum Efisien (7<10)	Efisiensi (7≥13)	Belum Efisien (7<13)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10=9/8	11	12	13=12/11	14	15	16	17
1 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	261,36	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	PP	54	54	100,00%	587.418.000	579.631.369	98,67%	636	582	91,40%	V		V	
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	PP	25	25	100,00%	129.525.000	125.894.400	97,20%	225	215	95,56%	V		V	
										861	797					
2 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	105,88	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	PP	92	92	100,00%	1.172.200.000	1.160.556.820	99,01%	810	756	93,27%	V		V	
3 Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi Tanggung Jawab Perwakilan	107,95	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	PP	27	27	100,00%	157.680.000	156.472.311	99,23%	304	275	90,36%	V		V	
4 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	118,40	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	PP	85	85	100,00%	291.150.000	285.268.596	97,98%	748	687	91,75%	V		V	
							291.150.000	285.268.596	97,98%	748	687	91,75%				
5 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	79,41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	PP	165	165	100,00%	236.972.000	235.898.000	99,55%	560	518	92,50%	V		V	
6 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	83,89	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	PP	119	119	100,00%	1.573.780.000	1.522.661.237	96,75%	996	971	97,46%	V		V	
		Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	PP	30	30	100,00%	256.890.000	243.991.997	94,98%	300	266	88,50%	V		V	
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	PP	49	49	100,00%	431.635.000	419.468.401	97,18%	659	614	93,10%	V		V	
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	PP	21	21	100,00%	257.290.000	252.049.160	97,96%	534	442	82,77%	V		V	
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	PP	38	38	100,00%	348.962.000	344.743.700	98,79%	960	937	97,58%	V		V	
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	PP	17	17	100,00%	144.841.000	144.544.037	99,79%	265	228	85,97%	V		V	
7 Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	112,77	Layanan Umum/Dukman Perwakilan BPKP	Layanan	1	1	100,00%	637.940.000	626.945.089	98,28%	530	530	100,00%	V		V	
		Layanan Perkantoran Perwakilan BPKP	Layanan	1	1	100,00%	30.084.308.000	29.983.727.230	99,67%	1080	1080	100,00%	V		V	
		Layanan Sarana Perwakilan BPKP	Unit	85	85	100,00%	461.220.000	460.690.000	99,89%	344	310	90,12%	V		V	
		Layanan Prasarana Perwakilan BPKP	Unit	12	12	100,00%	911.920.000	907.989.079	99,57%	200	200	100,00%	V		V	



**PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK) TAHUN 2023
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Sasaran Strategis (Sastra)	Rincian Output (RO)	Kinerja RO							
		Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (turun) Realisasi	% capaian 2023	% capaian 2022	% Naik (turun) Capaian	
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	
1 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	LHP	54	54	-	100,00%	100,00%	-	
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	LHP	25	22	3	100,00%	100,00%	-	
2 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	LHP	92	94	-	2	100,00%	100,00%	-
3 Meningkatkan Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi Tanggung Jawab Perwakilan	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	LHP	27	30	-	3	100,00%	100,00%	-
4 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	LHP	85	82	3	100,00%	100,00%	-	
5 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	LHP	165	173	-	8	100,00%	100,00%	-
6 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	LHP	119	117	2	100,00%	100,00%	-	
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	LHP	60	63	-	3	100,00%	100,00%	-
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	LHP	49	50	-	1	100,00%	100,00%	-
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	LHP	21	25	-	4	100,00%	100,00%	-
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	LHP	38	35	3	100,00%	100,00%	-	
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	LHP	17	17	-	100,00%	100,00%	-	
7 Meningkatkan Tata Kelola Unit Kerja	Layanan Umum/Dukman Perwakilan BPKP	Layanan	1	1	-	100,00%	100,00%	-	
	Layanan Perkantoran Perwakilan BPKP	Layanan	1	1	-	100,00%	100,00%	-	
	Layanan Sarana Perwakilan BPKP	Unit	85	85	-	88,89%	88,89%	-	
	Layanan Prasarana Perwakilan BPKP	Unit	12	12	-	100,00%	100,00%	-	



Tingkat Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, MRI dan efektivitas Pengendalian Korupsi Pemda Kab/Kota

No	Nama Provinsi	SPIP			Kapabilitas APIP			MR			IEPK		
		Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	2	3,000	4	5	6	7	8	9	10	11	12,000	13	14
1	Sulawesi Selatan												
1	Provinsi Sulawesi Selatan	3,037	3	Terdefinisi	2,81	2	Structured	2,857	2	Berkembang	2,540	2	Berkembang
2	Kota Makassar	3,263	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,720	2	Berkembang	2,910	2	Berkembang
3	Kota Parepare	3,462	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	3,063	3	Terdefinisi	2,930	2	Berkembang
4	Kota Palopo	3,057	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,594	2	Berkembang	1,690	1	Rintisan
5	Kabupaten Bantaeng	3,105	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,970	2	Berkembang	2,830	2	Berkembang
6	Kabupaten Bulukumba	3,137	3	Terdefinisi	2,33	2	Structured	2,782	2	Berkembang	2,790	2	Berkembang
7	Kabupaten Gowa	3,201	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,950	2	Berkembang	2,740	2	Berkembang
8	Kabupaten Jeneponto	2,857	2	Berkembang	2,44	2	Structured	2,552	2	Berkembang	2,520	2	Berkembang
9	Kabupaten Kep. Selayar	1,000	1	Rintisan	2,85	2	Structured	1,000	1	Rintisan	1,000	1	Rintisan
10	Kabupaten Luwu	3,111	3	Terdefinisi	2,71	2	Structured	2,744	2	Berkembang	2,510	2	Berkembang
11	Kabupaten Maros	3,420	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	3,288	3	Terdefinisi	2,710	2	Berkembang
12	Kabupaten Sinjai	3,239	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	3,138	3	Terdefinisi	2,880	2	Berkembang
13	Kabupaten Soppeng	3,042	3	Terdefinisi	2,62	2	Structured	2,920	2	Berkembang	2,930	2	Berkembang
2	Kabupaten Takalar	2,847	2	Berkembang	2,91	2	Structured	2,670	2	Berkembang	2,010	2	Berkembang
15	Kabupaten Wajo	3,000	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,650	2	Berkembang	2,550	2	Berkembang
16	Kabupaten Barru	1,990	1	Rintisan	2,69	2	Structured	1,500	1	Rintisan	1,070	1	Rintisan
17	Kabupaten Bone	3,126	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	3,070	3	Terdefinisi	2,964	2	Berkembang
18	Kabupaten Enrekang	2,885	2	Berkembang	3,00	3	Delivered	2,780	2	Berkembang	2,964	2	Berkembang
19	Kabupaten Luwu Timur	3,120	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,950	2	Berkembang	2,980	2	Berkembang
20	Kabupaten Luwu Utara	3,010	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,840	2	Berkembang	2,890	2	Berkembang
21	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	3,270	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	3,050	3	Terdefinisi	2,928	2	Berkembang
22	Kabupaten Pinrang	3,078	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,989	2	Berkembang	2,890	2	Berkembang
23	Kabupaten Sidrap	3,387	3	Terdefinisi	3,00	3	Delivered	2,976	2	Berkembang	2,930	2	Berkembang
24	Kabupaten Tana Toraja	2,547	2	Berkembang	2,21	2	Structured	2,437	2	Berkembang	2,210	2	Berkembang
25	Kabupaten Toraja Utara	2,358	2	Berkembang	1,00	2	Structured	2,030	2	Berkembang	2,000	2	Berkembang

